

Katalog : 4102004.3277

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIMAHI**

Katalog : 4102004.3277

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2021



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIMAH**

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIMAH I 2021

ISSN	: -
No. Publikasi	: 32770.2207
Katalog	: 4102004.3277
Ukuran Buku	: 18.2 cm x 25.7 cm
Jumlah Halaman	: xii + 99 Halaman
Naskah	: BPS Kota Cimahi
Penyunting	: BPS Kota Cimahi
Desain Kover oleh:	: BPS Kota Cimahi
Penerbit	: © BPS Kota Cimahi
Pencetak	: BPS Kota Cimahi
Sumber Ilustrasi	: SD Juara Cimahi

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA CIMAHI 2021

Tim Penyusun

- Pengarah : Ir. Sitti Sarah
- Koordinator Teknis : Nuraeni Arumsari S.Si, M.T
- Naskah : 1. Ir. Ati Rohayati, MM
2. Muhammad Nurviana, S.Si
- Pengolah Data : 1. Windi Pramudyawardani, S.ST., M. Si
2. Ir. Ati Rohayati, MM
- Penyunting : 1. Nuraeni Arumsari S.Si, M.T
2. Nadhifa Fikriyah, S.Tr.Stat

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2021 merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi yang menyajikan perkembangan kesejahteraan rakyat Kota Cimahi tahun 2021. Publikasi ini berisi berbagai data yang bersumber dari data BPS yaitu hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) 2021, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2021, dan proyeksi Penduduk SP2020 Tahun 2021.

Publikasi ini menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan dikaji menurut 8 bidang yang mencakup Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup.

Kritik dan saran konstruktif dari berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik bagi instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi, maupun masyarakat luas. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi berbagai pihak sehingga publikasi ini dapat terbit tepat waktu.

Cimahi, September 2022

Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi



Ir. Sitti Sarah, M.M.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
Kependudukan.....	1
1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.....	3
1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk.....	7
1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan.....	9
1.4 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama.....	10
1.5 Penggunaan Alat/Cara KB.....	11
Kesehatan.....	13
2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk.....	15
2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita.....	17
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan.....	19
Pendidikan.....	23
3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis.....	25
3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah.....	26
3.3 Tingkat Pendidikan.....	27
3.4 Partisipasi Sekolah (APS, APM dan APK).....	28
Ketenagakerjaan.....	33
4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).....	35
4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan.....	40
4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan.....	44
4.4 Sektor Formal dan Sektor Informal.....	47
Taraf dan Pola Konsumsi.....	51
Perumahan dan Lingkungan.....	59
6.1 Kualitas Rumah Tinggal.....	61
6.2 Fasilitas Rumah Tinggal.....	63
6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal.....	65
Kemiskinan.....	67
7.1 Perkembangan Penduduk Miskin.....	69
7.2 Garis Kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).....	70

7.3 Karakteristik Pendidikan.....	73
7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan.....	74
7.5 Karakteristik Perumahan.....	76
Sosial Lainnya.....	79
8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	81
8.2 Perlindungan Sosial.....	82

<https://cimahikota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2020-2021.....	7
Tabel 1.2 Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2020-2021.....	8
Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2020 – 2021	17
Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2021.....	26
Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut Kelompok Umur, 2020-2021.....	29
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2021.....	30
Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2020-2021.....	42
Tabel 4.2 Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2020 – 2021.....	48
Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Cimahi, 2021.....	55
Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2020 dan 2021.....	61
Tabel 6.2 Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, Tahun 2020-2021.....	64
Tabel 6.3 Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2020 - 2021.....	66

<https://cimahikota.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Grafik 1.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi Tahun 2020-2021.....	4
Grafik 1.2 Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010-2020.....	5
Grafik 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi menurut Sensus Penduduk, 2000-2020.....	6
Grafik 1.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi menurut Proyeksi Sensus Penduduk 2020 Tahun 2021.....	6
Grafik 1.5 Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2021.....	9
Grafik 1.6 Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Cimahi, 2020-2021.....	11
Grafik 1.7 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2020-2021.....	12
Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (tahun), 2017-2021.....	16
Grafik 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama Menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2021.....	18
Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi, 2021.....	19
Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2021.....	20
Grafik 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2021...	21
Grafik 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (tahun), 2017-2021.....	27
Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2021.....	28

Grafik 3.3	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah, 2020-2021.....	31
Grafik 4.1	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Cimahi, Tahun 2020-2021.....	37
Grafik 4.2	Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, Tahun 2020-2021.....	38
Grafik 4.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2020 – 2021 (Persen).....	39
Grafik 4.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2020 – 2021.....	40
Grafik 4.5	Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2020-2021.....	41
Grafik 4.6	Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2020-2021.....	43
Grafik 4.7	Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2021.....	44
Grafik 4.8	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, 2020 – 2021.....	45
Grafik 4.9	Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, 2020 – 2021.....	47
Grafik 5.1	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut kelompok Komoditas di Kota Cimahi, 2020 – 2021.....	54
Grafik 5.2	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan di Kota Cimahi, 2021.....	56
Grafik 5.3	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Non Makanan di Kota Cimahi, 2021.....	57
Grafik 5.4	Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2017 – 2021.....	58
Grafik 6.1	Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2020 dan 2021	62
Grafik 7.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2016 - 2021 (Ribuan Jiwa)	70

Grafik 7.2	Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2016 – 2021 (Rupiah / Kapita / Bulan).....	71
Grafik 7.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Cimahi 2016-2021....	72
Grafik 7.4	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Cimahi, 2016-2021	72
Grafik 7.5	Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2020-2021.....	73
Grafik 7.6	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2020-2021.....	75
Grafik 7.7	Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2020-2021.....	76
Grafik 7.8	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama Kota Cimahi , Tahun 2020-2021.....	77
Grafik 8.1	Persentase penduduk berumur 5 Tahun ke Atas yang mempunyai Akses Teknologi dan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2020 dan 2021.....	82

Kependudukan



281.575

286.825

283.270

288.362

Berdasarkan hasil SP2020 jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai **568.500 jiwa**, sedangkan tahun **2021** mencapai **571.632 jiwa** (Hasil Proyeksi SP2020), dengan kepadatan penduduk mencapai **14.160 jiwa per km²**

Tahun 2021, terdapat **24,79 persen** wanita yang **melakukan perkawinan pertama** dibawah **usia 19 tahun**

Sex Ratio Kota Cimahi tahun 2021 sebesar **101,80**, artinya dari setiap **100 penduduk perempuan** terdapat **102 penduduk laki-laki**



Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) Tahun 2021 sebesar **39,87 persen**

Kependudukan

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2006). Penduduk sebagai pelaku dan sasaran pembangunan, sekaligus juga yang menikmati hasil pembangunan namun juga bisa menjadi masalah yang bisa menghambat pembangunan suatu negara. Masalah kependudukan sangat mempengaruhi kesejahteraan dan perkembangan suatu daerah dan Negara.

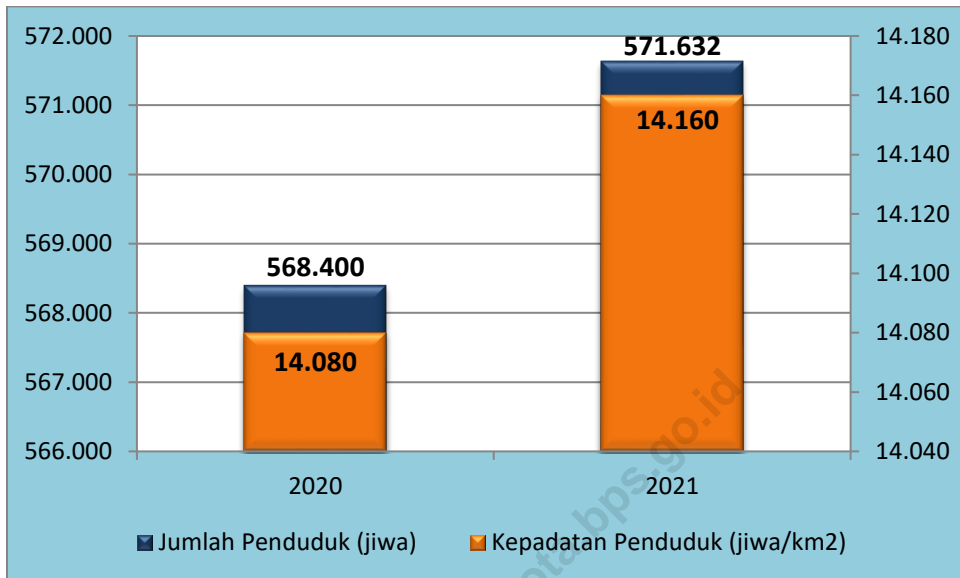
Masalah yang berkaitan dengan penduduk merupakan tugas besar dari semua pihak khususnya pemerintah untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat dalam mengatasinya. Masalah kependudukan adalah salah satu masalah krusial yang mengakibatkan efek domino terhadap permasalahan lain yaitu lingkungan, kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.

Jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk harus menjadi perhatian utama pemerintah dalam hal kependudukan, karena Jumlah Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbesar di kawasan ASEAN dan merupakan urutan empat terbesar di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat.

1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Cimahi yang banyak, akan mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat Kota Cimahi kedepannya. Dampak tersebut harus dicarikan solusi yang tepat untuk menanggulangnya. Jumlah penduduk Kota Cimahi tahun 2021 adalah 571.632 (Hasil Proyeksi SP2020). Dengan penduduk yang besar maka pemerintah tidak akan kesulitan dalam penyediaan tenaga kerja, namun di sisi lain jumlah penduduk yang besar ini memerlukan perhatian dari pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan penduduknya baik material maupun rohaniannya. Masalah-masalah lain akan timbul seperti kemiskinan, pengangguran dan lain-lain.

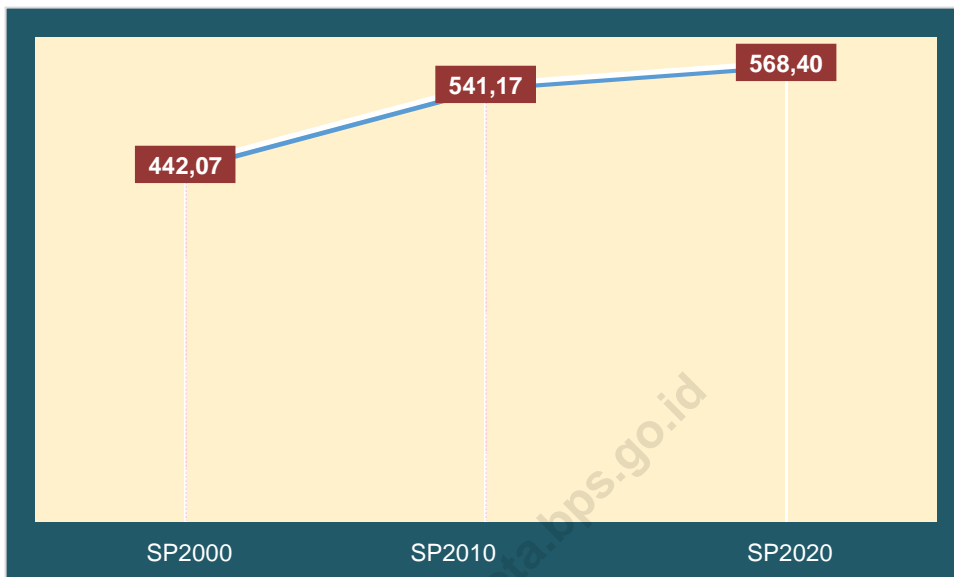
**Grafik 1.1. Jumlah dan Kepadatan Penduduk di Kota Cimahi
Tahun 2020-2021**



Sumber: Hasil SP2020 dan Proyeksi SP2020 Penduduk Kota Cimahi 2021

Berdasarkan hasil SP2020 jumlah penduduk Kota Cimahi mencapai 568.500 jiwa, sedangkan tahun 2021 mencapai 571.632 (Hasil Proyeksi SP2020) mengalami penambahan sebanyak 3.232 jiwa atau meningkat sebesar 5,69 persen pada tahun 2021. Pada publikasi tahun lalu jumlah penduduk dihitung berdasarkan hasil proyeksi SUPAS (Survei Antar Sensus) 2015, Namun setelah dihasilkan hasil SP2020, penduduk tahun 2020 berdasarkan hasil sensus tersebut, sedangkan jumlah penduduk 2021 diperoleh dari hasil proyeksi SP2020.

Grafik 1.2. Jumlah Penduduk di Kota Cimahi Menurut Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010-2020

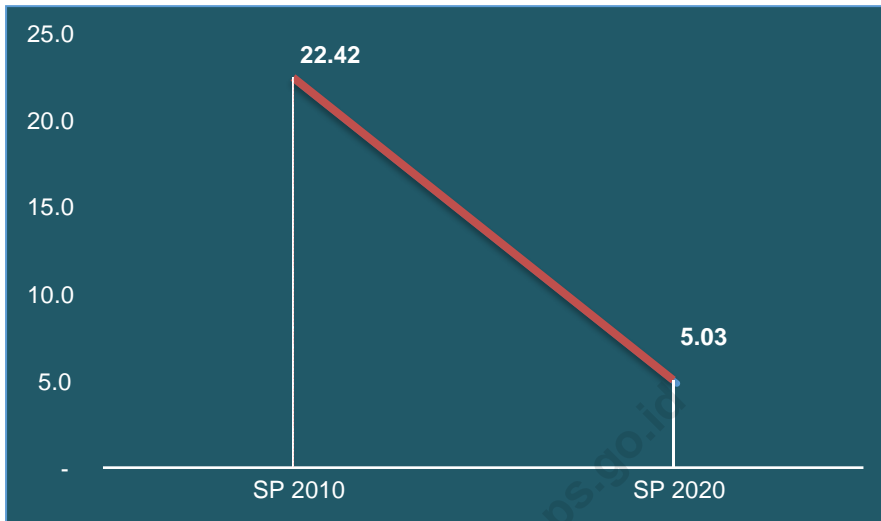


Sumber: Sensus Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, jumlah penduduk Kota Cimahi selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan Sensus Penduduk 2000, dua puluh tahun yang lalu, jumlah penduduk Kota Cimahi sebanyak 442.077 jiwa mengalami peningkatan sebesar 28,57 persen pada tahun 2020 atau dengan kata lain mengalami penambahan sebanyak 126.323 jiwa.

Dilihat dari grafik laju pertumbuhan penduduk tahun 2000 hingga tahun 2020, laju pertumbuhan penduduknya terus mengalami perlambatan. Pada tahun 2020 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 5,03 persen atau mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2010 laju pertumbuhan penduduk Kota Cimahi sebesar 22,42 persen mengalami penurunan sebesar 17,39 persen pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pengendalian pertumbuhan penduduk Kota Cimahi dari tahun ke tahunnya.

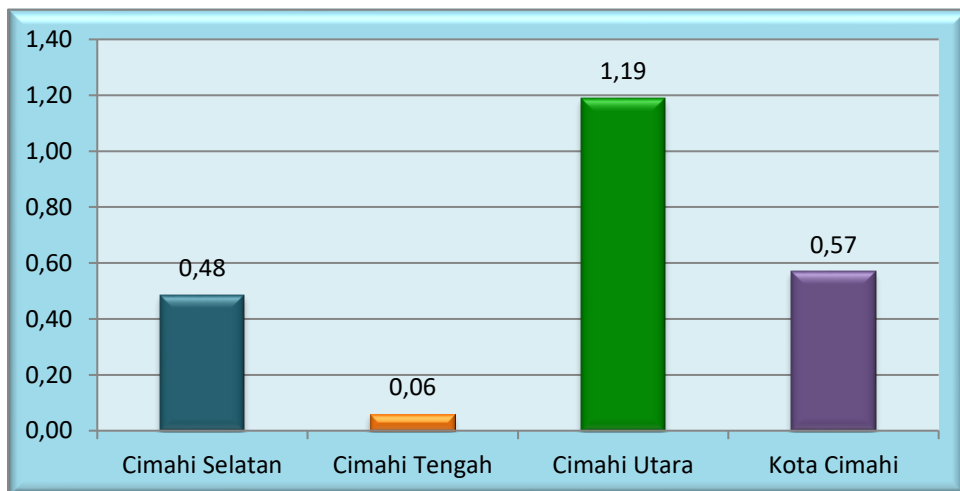
Grafik 1.3. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi menurut Sensus Penduduk, 2010-2020



Sumber: Sensus Penduduk Kota Cimahi, 2010-2020

Laju pertumbuhan penduduk di kecamatan di Kota Cimahi pada tahun 2020 secara umum juga mengalami perlambatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Grafik 1.4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Cimahi menurut Proyeksi Sensus Penduduk 2020 Tahun 2021



Sumber: Proyeksi SP2020, 2021

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kota Cimahi tahun 2021 menurut Proyeksi SP2021, adalah sebesar 0,57 persen. LPP Kecamatan Utara menempati pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 1,19 persen, diikuti Kecamatan Selatan sebesar 0,48 persen dan Kecamatan Cimahi Tengah 0.06 persen. Diakui wilayah Kecamatan Cimahi Utara masih memiliki potensi untuk pengembangan daerah pemukiman, dimana terdapat pembangunan kluster-kluster perumahan.

1.2 Sebaran dan Kepadatan Penduduk

Sebaran atau distribusi penduduk menurut kecamatan di Kota Cimahi relatif tidak berimbang, terlihat bahwa penduduk Kota Cimahi terpusat di 1 kecamatan yaitu kecamatan Cimahi Selatan. Sebaran penduduk yang tidak merata akan menimbulkan banyaknya permasalahan kependudukan, seperti kemacetan, pengangguran, kebutuhan pemukiman dan masalah-masalah lain.

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2020 – 2021

Kecamatan	2020		2021	
	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Cimahi Selatan	240,990	42.40	242,158	42.36
Cimahi Tengah	161,758	28.46	161,852	28.31
Cimahi Utara	165,652	29.14	167,622	29.32
Kota Cimahi	568,400	100.00	571,632	100.00

Sumber: Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Proyeksi SP2020 Tahun 2021 Kota Cimahi

Persoalan lain terkait dengan jumlah penduduk adalah sebaran penduduk dan kepadatan penduduk penduduk yang tidak merata. Pada tahun 2021 jumlah penduduk Cimahi Selatan merupakan jumlah penduduk

terbanyak yaitu sebanyak 242.158 jiwa atau 42,36 persen dari total jumlah penduduk Cimahi. Berikutnya diikuti oleh Kecamatan Cimahi Utara dan Cimahi tengah dengan jumlah penduduk dan sebaran masing-masing sebanyak 167.622 jiwa (29,32 persen) dan 161.852 jiwa (28,31 persen).

Tabel 1.2. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi Tahun 2020 - 2021

Kecamatan	2020	2021
Cimahi Selatan	14.226	14.295
Cimahi Tengah	16.000	16.009
Cimahi Utara	12.436	12.584
Kota Cimahi	14.080	14.160

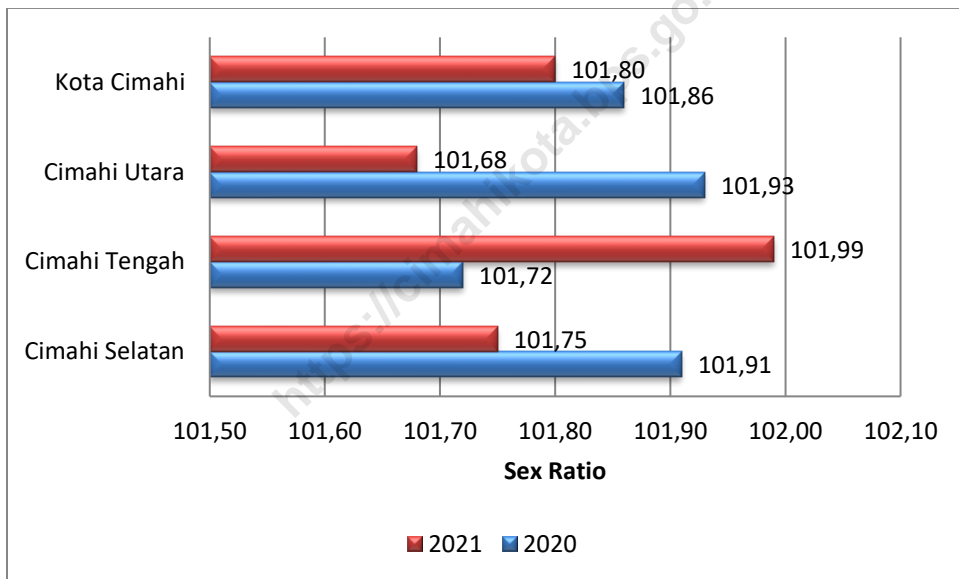
Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Proyeksi SP2020 Tahun 2021 Kota Cimahi

Dari Tabel 1.2 terlihat Kepadatan Penduduk Kota Cimahi Tahun 2021 sebanyak 14.160 jiwa per km². Kecamatan Cimahi Tengah merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu mencapai 16.009 jiwa per km² diikuti oleh Kecamatan Cimahi Selatan dan Kecamatan Cimahi Utara yang mencapai 14.295 jiwa per km² dan 12.584 jiwa per km². Kepadatan penduduk Kota Cimahi termasuk tingkat kepadatan penduduk yang tinggi di wilayah Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut dapat dijelaskan, dimana Kota Cimahi termasuk kota penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat, sehingga letaknya cukup strategis dan menjadi magnet pendatang untuk berdomisili di sini. Namun dengan wilayah terbatas dan hanya terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, masalah tingginya kepadatan penduduk tidak dapat dihindarkan. Dalam hal ini berimplikasi pada kondisi tata ruang dan wilayah yang perlu penanganan dan perhatian dari Pemerintah.

1.3 Rasio Jenis Kelamin dan Angka Beban Ketergantungan

Rasio Jenis Kelamin (*Sex Ratio*) dan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) merupakan salah satu indikator demografi yang sangat penting. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah, sedangkan angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) menunjukkan berapa tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Grafik 1.5. Rasio Jenis Kelamin Kecamatan di Kota Cimahi, 2021



Sumber: Sensus Penduduk (SP) 2020 dan Proyeksi SP2020 Tahun 2021 Kota Cimahi

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 101,80. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 102 penduduk laki-laki, atau dengan kata lain jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Apabila kita lihat rasio jenis kelamin per kecamatan di Kota Cimahi, maka dari semua Kecamatan memiliki rasio jenis kelamin dengan nilai disekitar 102 selama 2 tahun terakhir. Tahun 2021, rasio jenis kelamin tertinggi terletak pada Kecamatan Cimahi Selatan yaitu sebesar 101,99, sedangkan yang

terendah di Kecamatan Cimahi Utara sebesar 101,68.

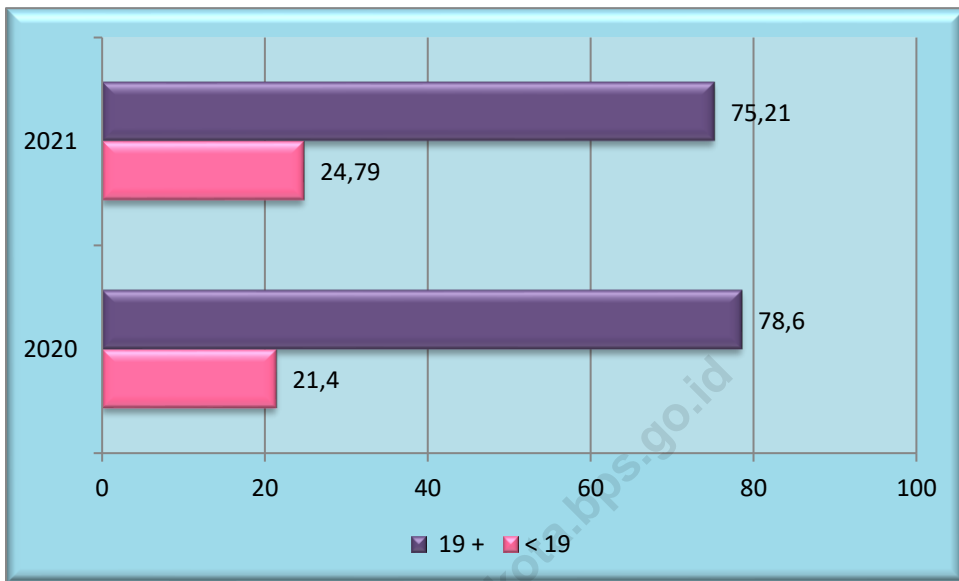
Angka beban ketergantungan (*Dependency Ratio*) Kota Cimahi Tahun 2021 adalah sebesar 39,87 persen, menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Usia produktif antara 15 – 64 tahun, usia non produktif yaitu usia 0 – 14 tahun dan usia diatas 65 tahun.

1.4 Wanita Menurut Usia Kawin Pertama

Usia Kawin Pertama bisa dijadikan salah satu pemicu penambahan jumlah penduduk, semakin panjang masa reproduksi seorang wanita semakin banyak kemungkinan anak yang bisa dilahirkan. Menurut UU Perkawinan 1 Tahun 1974 pada pasal 7 ayat (1), syarat menikah untuk laki-laki minimal sudah berusia 19 tahun, dan untuk perempuan harus sudah berusia minimal 16 tahun. Jika menikah dibawah usia 21 tahun harus disertai dengan ijin kedua atau salah satu orangtua atau yang ditunjuk sebagai wali (pasal 6 ayat 2).

Sedangkan menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahan pertama bagi remaja saat ini idealnya 21 hingga 25 tahun. Pada usia itu, remaja sudah tumbuh pengetahuan dan kesadaran dalam pengelolaan kesehatan reproduksi. Hal itu berpengaruh terhadap kesehatan pasangan maupun anak dari pasangan muda itu, jadi dimasa mendatang usia remaja menikah pertama pada usia dewasa. Dengan tumbuhnya usia nikah semakin dewasa dapat menunjang keberhasilan program KB dengan menurunnya angka anak dilahirkan seorang ibu atau Angka kelahiran Total (TFR).

Grafik 1.6. Persentase Wanita yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama di Kota Cimahi, 2020 – 2021



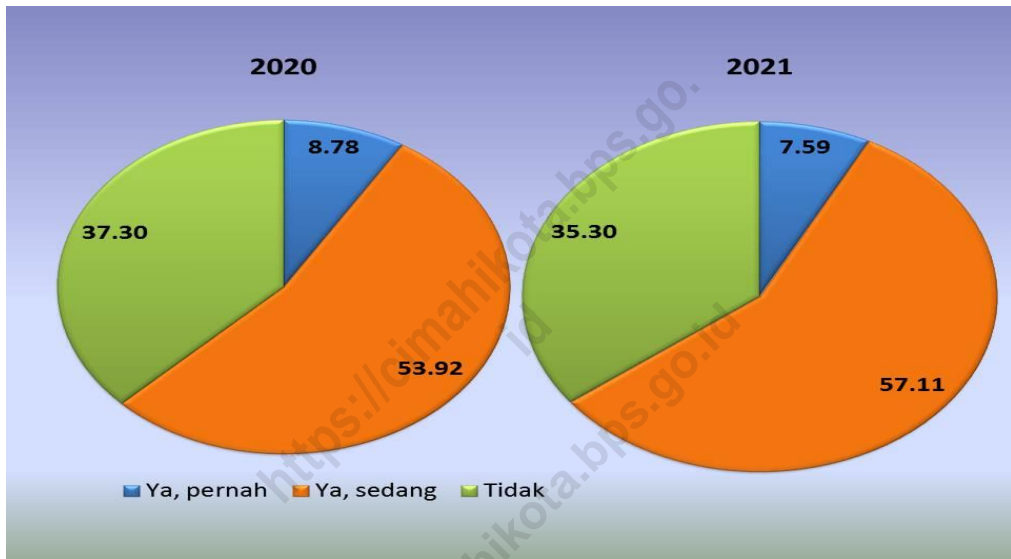
Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020-2021

Berdasarkan Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2021 sebagian besar wanita di Kota Cimahi melakukan perkawinan pertamanya pada usia 19 tahun ke atas yaitu sebesar 75,21 persen. Hal ini berarti masih ada 24,79 persen yang melakukan perkawinan pertama dibawah usia 19 tahun. Pada tahun sebelumnya perkawinan pertama pada usia dibawah 19 tahun sebesar 21,4 persen, artinya tahun 2021 sedikit terjadi peningkatan persentase untuk perkawinan di bawah usia 19 tahun.

1.5 Penggunaan Alat/Cara KB

Pemerintah saat ini sudah menggalakkan kembali program KB (Keluarga Berencana). Program ini tidak hanya bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui kelahiran, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas kesehatan ibu serta mewujudkan bonus demografi yang berkualitas.

Grafik 1.7. Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin di Kota Cimahi dan Penggunaan Alat /Cara KB Sedang Digunakan, 2020-2021



Sumber: Susenas Maret, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2020-2021

Wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan KB sebanyak 57,11 persen, yang tidak pernah menggunakan KB 35,30 persen dan yang pernah menggunakan 7,59 persen. Sedangkan pada tahun sebelumnya persentase wanita yang menggunakan alat KB lebih sedikit yaitu 53,92 persen.

Kesehatan



Klinik Bersama
27,62 %

Puskesmas
23,57 %



RS Pemerintah
11,61 %



RS Swasta
23,92 %



Praktek Dokter/
Bidan 13,78 %

Persentase
Penduduk yang
Berobat Jalan
Selama Sebulan
Terakhir Menurut
Tempat Berobat
Jalan

Pengobatan
Tradisional
2,36 %



UKBM
0,96 %

Persentase Penduduk
yang Menderita Sakit
Selama Sebulan Terakhir

Perempuan
17,67 %



Laki-laki
14,81 %



Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Cimahi hanya sebesar **74,21 tahun**

Susenas Kota Cimahi Maret 2021

Kesehatan

Salah satu tujuan nasional adalah memajukan kesejahteraan bangsa, yang berarti memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, lapangan kerja dan ketenteraman hidup. Tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, jadi tanggung jawab untuk terwujudnya derajat kesehatan yang optimal berada di tangan seluruh masyarakat, pemerintah dan swasta bersama-sama. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah sudah melakukan berbagai program-program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, seperti dengan meningkatkan fasilitas kesehatan seperti melalui BPJS, puskesmas-puskesmas, meningkatkan fasilitas tenaga kesehatan, menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi, meningkatkan tingkat Imunitas dan gizi balita dan sebagainya.

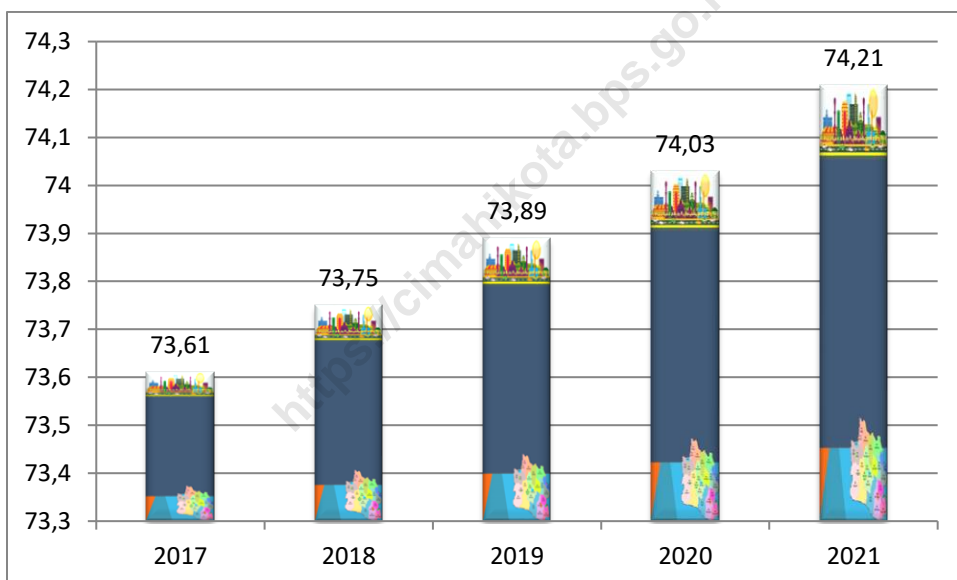
Berhasil tidaknya program-program pemerintah dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan berbagai indikator kesehatan seperti Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu, Angka Kesakitan, prevalensi Balita Kurang Gizi dan indikator-indikator yang lain yang berkaitan dengan tenaga medis dan fasilitas kesehatan.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita di suatu wilayah merupakan salah satu rujukan melihat tingkat kesehatan di wilayah tersebut. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam menurunkan Angka kematian Bayi dan Balita, tidak hanya terfokus pada kewajiban pemerintah saja, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan sangatlah penting, khususnya pengetahuan ibu dalam merawat bayi dan balitanya.

Dimensi kesehatan tidak hanya mencakup Angka Kematian Bayi dan Balita, tetapi juga bisa dilihat dari Angka Harapan Hidup saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2017 hingga 2021, Kota Cimahi telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,60 tahun. Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup saat lahir di Kota Cimahi hanya sebesar 73,61 tahun, dan pada tahun 2021 telah mencapai 74,21 tahun. Semakin meningkatnya angka harapan hidup mengindikasikan bahwa masyarakat Kota Cimahi mengalami usia yang lebih panjang dari tahun ke tahun.

Grafik 2.1 Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) Kota Cimahi (Tahun), 2017-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2021

Peningkatan angka harapan hidup sangat dipengaruhi banyak faktor, seperti semakin baik dan teraksesnya pelayanan kesehatan bagi semua kelompok masyarakat, perilaku hidup sehat oleh masyarakat luas dan semakin baiknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat disertai dukungan peningkatan kesehatan lingkungan.

Persentase penduduk Kota Cimahi yang menderita sakit pada tahun 2021 sebesar 16,23 persen. Persentase ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu mencapai 11,72 persen. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin persentase penduduk yang sakit maka penduduk laki-laki lebih kecil dibanding penduduk perempuan. Penduduk laki-laki yang menderita sakit sebesar 14,81 persen dan penduduk perempuan sebesar 17,67 persen.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Menderita Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, 2020-2021

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Total	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
2020	11,19	88,81	12,26	87,74	11,72	88,28
2021	14,81	85,19	17,67	82,33	16,23	83,77

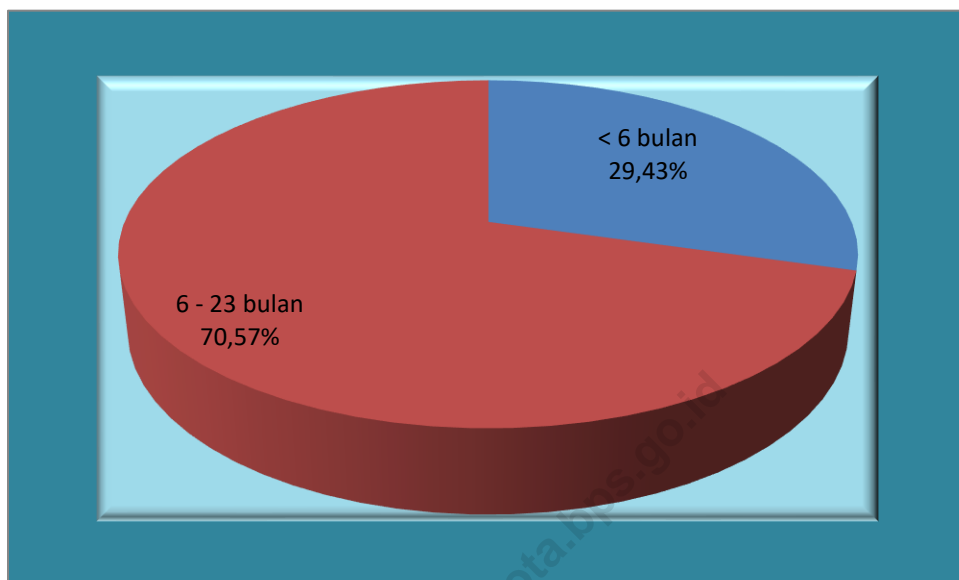
Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

2.2 Tingkat Imunitas dan Gizi Balita

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena ASI mengandung zat gizi dengan komposisi sesuai dengan kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang bayi secara optimal (WHO 2001; Prasetyono, 2009). Selain itu peningkatan program ASI eksklusif merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Air Susu ibu sangat dianjurkan untuk diberikan kepada bayi, karena ASI merupakan makanan pertama bayi yang sangat dibutuhkan bayi untuk jangka panjang dalam proses tumbuh kembang. ASI memiliki nutrisi terbaik dan zat-zat berkualitas tinggi yang bisa memberikan antibodi dan tingkat kecerdasan untuk bayi.

Grafik 2.2 Persentase Anak Usia Kurang dari 2 Tahun yang Pernah Diberi ASI Menurut Lama menyusui (Bulan) di Kota Cimahi, 2021

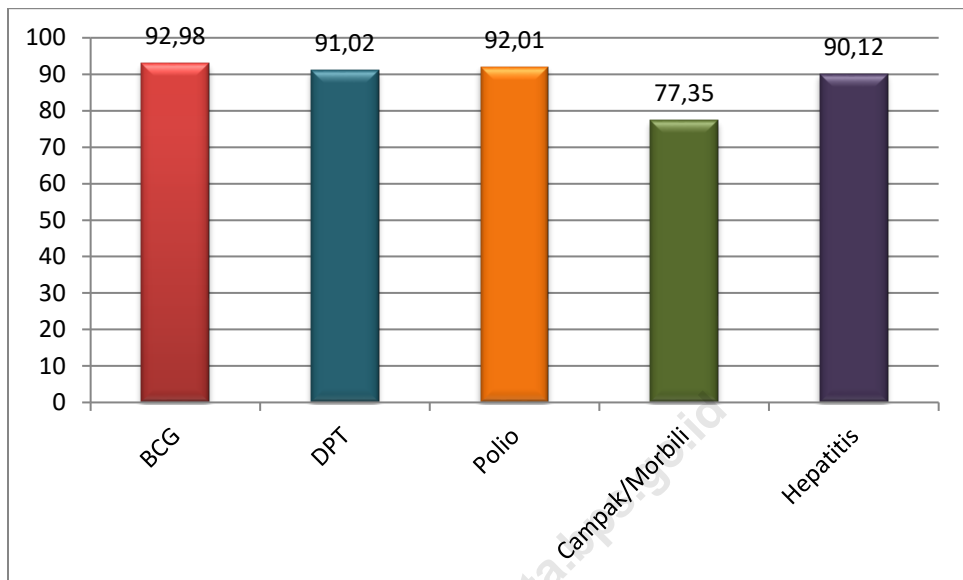


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2020

Sangat dianjurkan seorang ibu dapat menyusui selama 2 tahun, karena semakin lama bayi mendapatkan ASI akan memberikan kekebalan yang lebih kuat pada bayi. Di Kota Cimahi pada tahun 2021, rata-rata lama bayi diberi ASI selama 9,54 bulan. Persentase paling besar yaitu anak yang disusui kurang dari 6 bulan yaitu sebesar 29,43 persen, kemudian yang disusui selama 6 hingga 23 bulan sebesar 70,57 persen.

Selain ASI hal yang sangat diperlukan bagi kesehatan anak dan tingkat kekebalan tubuh anak adalah pemberian imunisasi. Imunisasi merupakan pemberian sistem kekebalan tubuh anak agar kuat terhadap suatu penyakit, jenis imunisasi ada dua macam yaitu kekebalan tubuh yang sudah ada pada diri anak yang merupakan bawaan sejak lahir dan kekebalan yang diberikan kepada anak seperti pemberian vaksin bisa melalui suntik ataupun tetes. Di Indonesia imunisasi ada yang wajib dan juga ada yang dianjurkan, imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak, dan Hepatitis B.

Grafik 2.3 Persentase Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi, di Kota Cimahi, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

Berdasarkan publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2021, hampir semua balita yang ada di Kota Cimahi pernah mendapatkan imunisasi wajib, hal ini terlihat dari Grafik 2.3, bahwa lebih dari 77 persen balita mendapat imunisasi wajib seperti BCG, DPT, Polio, Campak dan Hepatitis B. Persentase terbesar adalah imunisasi BCG sebesar 92,98 persen. Sedangkan persentase terkecil adalah imunisasi campak sebesar 77,35 persen.

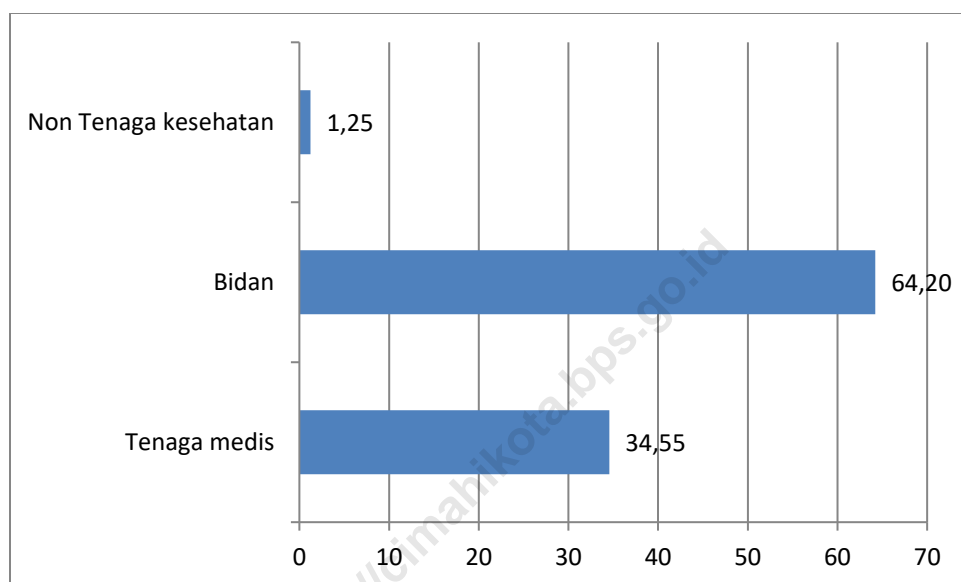
2.3 Pemanfaatan Fasilitas Tenaga Kesehatan

Dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi fasilitas dan tenaga kesehatan sangatlah penting. Tenaga medis yang handal dan fasilitas kesehatan yang lengkap sangat penting karena bisa mempengaruhi keselamatan ibu dan bayi. Pemerintah sudah melakukan upaya-upaya melalui berbagai program kesehatan salah satunya melalui perbaikan fasilitas kesehatan seperti yang tercantum pada Perpres No 5 tahun 2010.

Secara umum di Kota Cimahi persentase perempuan berumur 15-49 tahun

yang pernah kawin jika dilihat dari penolong proses kelahirannya, paling banyak ditolong oleh bidan, yaitu sebesar 64,20 persen. Sementara itu proses kelahirannya dibantu oleh tenaga medis/dokter sebesar 34,55 persen.

Grafik 2.4 Persentase Perempuan Berumur 15-49 Tahun yang Pernah Kawin Menurut Penolong Proses Kelahiran Terakhir, 2021



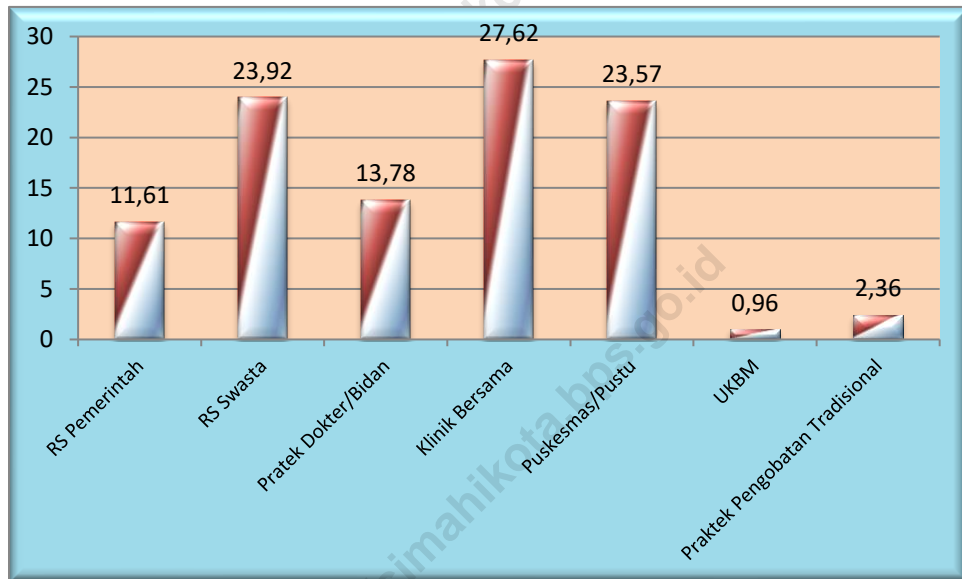
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

Hal-hal yang berkaitan dengan fasilitas kesehatan tidak hanya penolong persalinan, tetapi juga fasilitas tempat berobat. Pemanfaatan fasilitas kesehatan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal. Jarak rumah ke tempat berobat sangat mempengaruhi dalam menentukan pilihan dimana mereka akan berobat.

Menurut publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2021 yang diperoleh, ada beberapa tempat berobat yang jadi pilihan masyarakat untuk berobat jalan selama sebulan terakhir, seperti rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, praktek dokter/bidan, klinik, Puskesmas, UKBM (yang terdiri dari Pokesdes, Polindes, Posyandu, dan Balai Pengobatan), praktek pengobatan tradisional dan lainnya. Dari beberapa tempat berobat, di Kota Cimahi persentase terbesar penduduk

berobat di Klinik/Praktek Dokter Bersama yaitu sebesar 27,62 persen, kemudian diikuti oleh RS Swasta dan Puskesmas/Pustu sebesar 23,92 persen dan 23,57 persen.

Grafik 2.5 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Tempat Berobat Jalan di Kota Cimahi, 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021



Pendidikan

Rata-rata Lama Sekolah mencapai 11,08 tahun sedangkan Harapan Lama Sekolah mencapai 13,81 tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2021 (Persen)



7 - 12 tahun	99,52 %
13 - 15 tahun	98,88 %
16 - 18 tahun	78,52 %



SD/MI Sederajat



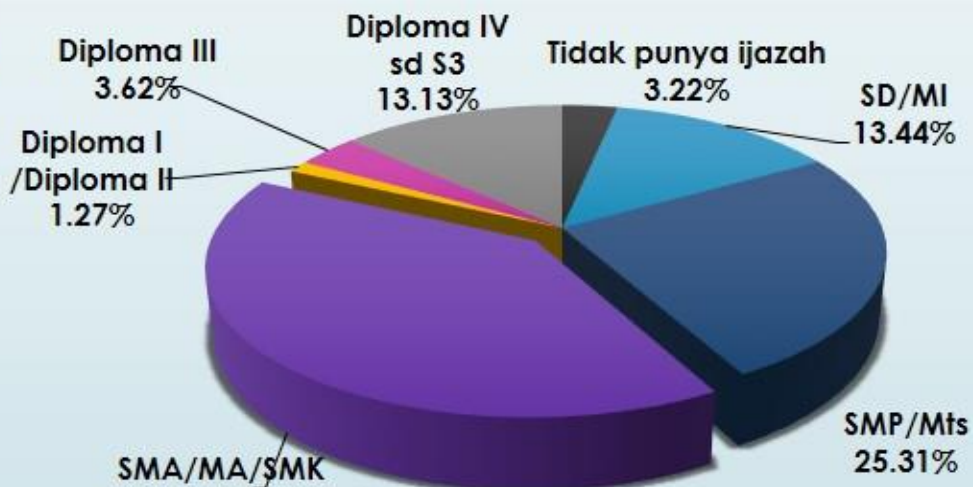
SMP/MTs Sederajat



SMA/SMK/MA Sederajat

APS

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APS usia 16 - 18 tahun baru mencapai 78,52 persen



Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA/SMK/MA sebanyak 40,01 persen

Pendidikan

Salah satu upaya paling strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Dengan pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Rumusan tentang pendidikan, lebih jauh termuat dalam UU. No. 20 Tahun 2003, bahwa pendidikan Indonesia bertujuan agar masyarakat Indonesia mempunyai pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Artinya, arah dari proses pendidikan nasional mencakup berbagai aspek kehidupan diri manusia dan masyarakat untuk survive dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Beberapa aspek yang berkaitan dengan pendidikan dapat memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia yang ada antara lain harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, tingkat pendidikan dan tingkat partisipasi sekolah.

3.1 Kemampuan Membaca dan Menulis

Kemampuan membaca dan menulis sangat penting karena dapat mencerdaskan intelektual, spiritual, emosional, dan kepercayaan. Membaca akan membuka peluang untuk menyerap sebanyak mungkin ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan dan memungkinkan seseorang dapat memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan membaca dan menulis juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan kreatif, kritis, analitis dan imajinatif sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas.

Secara umum kemampuan membaca dan menulis penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi sudah cukup bagus. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang mampu membaca dan menulis huruf latin pada tahun 2021 persentasenya sangat besar yaitu 99,73 persen.

Apabila kita lihat berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki- laki yang berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis lebih besar dari pada perempuan dalam huruf latin. Penduduk laki-laki yang bisa membaca dan menulis

huruf latin sebesar 99,90 persen dan perempuan sebesar 99,56 persen. Persentase penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi yang bisa membaca dan menulis huruf arab juga cukup besar yaitu sebesar 77,79 persen laki-laki dan sebesar 79,03 persen perempuan.

Tabel 3.1 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin Dan Kemampuan Membaca Dan Menulis, 2021

Jenis Kelamin	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Lainnya	Buta Huruf
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	99,90	77,79	2,99	0,10
Perempuan	99,56	79,03	3,68	0,44
Total	99,73	77,79	2,99	0,27

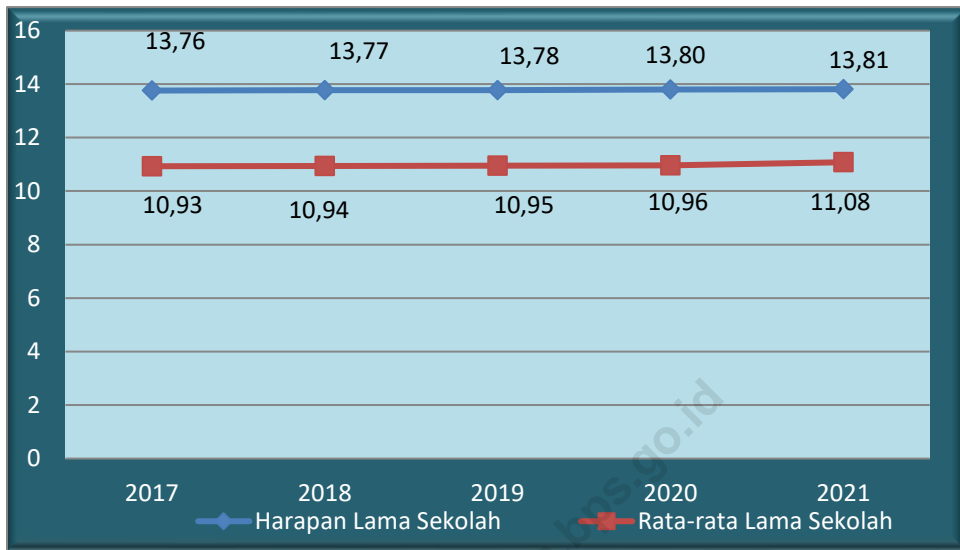
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat 2021, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi yang buta huruf terdapat 0,27 persen.

3.2 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2017 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah meningkat sebesar 0,05 tahun, sementara Rata-rata Lama Sekolah meningkat 0,15 tahun.

Grafik 3.1 Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah Kota Cimahi (Tahun), 2017-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, 2021

Selama periode 2017 hingga 2021, Harapan Lama Sekolah terus meningkat tiap tahunnya. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah dapat diartikan bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Di tahun 2021, Harapan Lama Sekolah di Kota Cimahi telah mencapai 13,81 yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga lulus D1 atau D2.

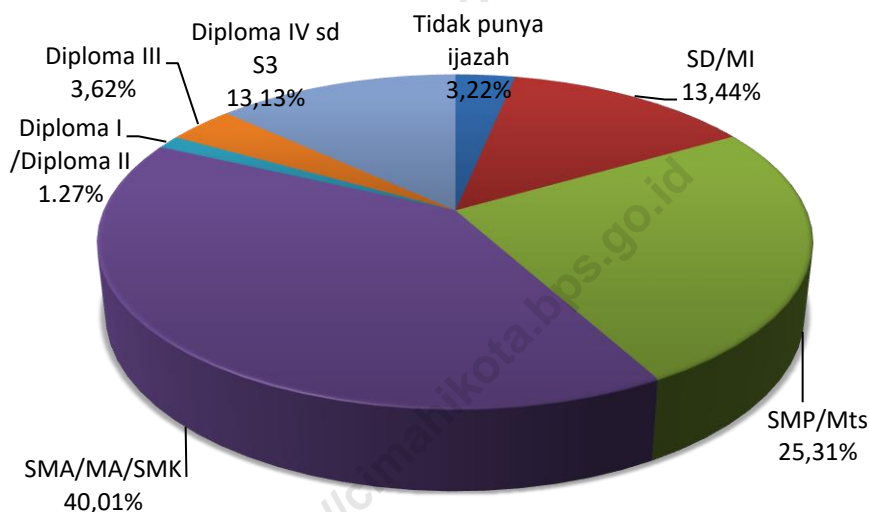
Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk di suatu wilayah. Indikator ini merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah di Kota Cimahi terus bertambah selama periode 2017 hingga 2021. Tahun 2021 mencapai 11,08 tahun. Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Cimahi yang lebih baik. Hingga tahun 2021, secara rata-rata penduduk Kota Cimahi usia 15 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga bangku SMA.

3.3 Tingkat Pendidikan

Tingginya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat sangat penting bagi kesiapan bangsa menghadapi tantangan global di masa depan. Tingkat pendidikan

yang lebih tinggi memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan, keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya yang tergambar melalui tingkat pendidikan.

Grafik 3.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

Berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Barat tahun 2021, penduduk berumur 15 tahun ke atas di Kota Cimahi persentase paling besar yang memiliki ijazah tertinggi adalah ijazah SMA/SMK/MA atau bisa dikatakan tamat SMA/SMK/MA sebesar 40,01 persen, kemudian SMP/MTs sebesar 25,31 persen dan SD/MI sebesar 13,44 persen. Hal ini berarti, program pemerintah di bidang pendidikan harus terus digalakkan demi tercapainya program wajib belajar 9 tahun.

3.4 Partisipasi Sekolah (APS, APK dan APM)

Peningkatan mutu pendidikan masih terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana

pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dilihat dari beberapa indikator antara lain Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk) dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk kelompok umur tersebut.

APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. APS Kota Cimahi tahun 2021 kelompok Umur 7-12 tahun sebesar 99,52 persen, 13-15 tahun sebesar 98,88 persen dan 16-18 tahun sebesar 78,52 persen.

Tabel 3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, 2020-2021

Kelompok Umur	2020	2021
(1)	(2)	(3)
7 - 12 tahun	99,60	99,52
13 - 15 tahun	98,87	98,88
16 - 18 tahun	79,15	78,52

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret, 2020-2021

Jika dibandingkan dengan APS tahun 2020, APS 2021 terjadi sedikit penurunan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 16- 18 tahun, dimana tahun sebelumnya masing-masing mencapai 99,60 persen dan 79,15 persen. Sedangkan pada kelompok umur 13-15 tahun relatif sama, tahun 2021 mencapai 98,87 persen.

Ditinjau dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang digunakan untuk melihat partisipasi sekolah menurut jenjang pendidikan tertentu, baik di jenjang SD, SMP maupun SMA. Secara umum di Kota Cimahi APM SD/MI sederajat lebih tinggi jika dibandingkan dengan APM SMP dan SMA. Hal ini menggambarkan bahwa hampir semua penduduk mengenyam pendidikan SD.

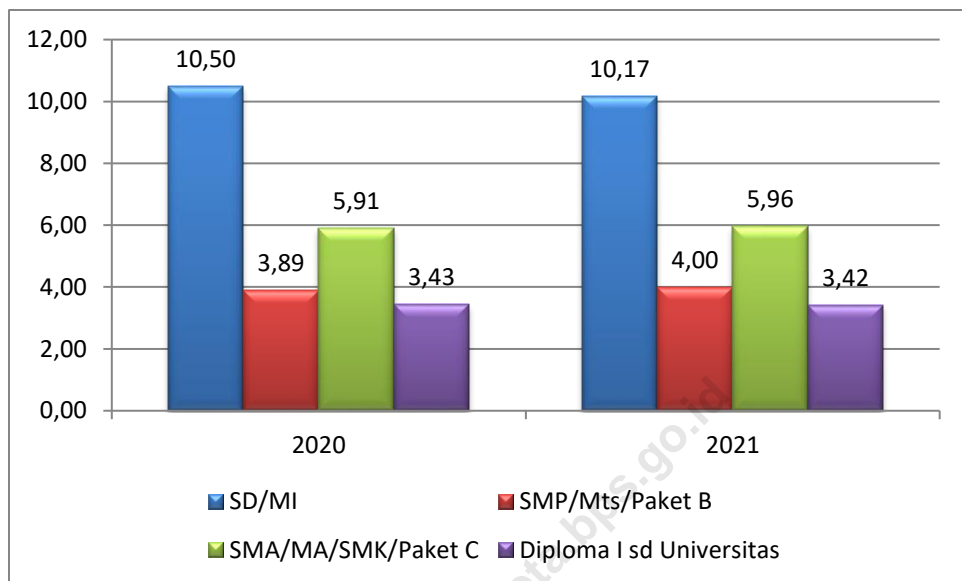
Tabel 3.3 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan, 2021

Jenjang Pendidikan	APM	APK
(1)	(2)	(3)
SD/MI Sederajat	96,34	102,81
SMP/MTs Sederajat	80,50	89,74
SMA/SMK/MA Sederajat	71,10	99,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

Untuk penduduk berumur lima tahun ke atas yang masih bersekolah pada dua tahun terakhir di Kota Cimahi, persentase terbesar pada tingkat setara SD yaitu sebesar 10,50 persen pada tahun 2020 dan 10,17 persen pada tahun 2021. Sedangkan yang masih bersekolah di tingkat Diploma I / Universitas persentasenya paling kecil yaitu sebesar 3,43 persen pada tahun 2020 dan mengalami penurunan menjadi 3,42 persen pada tahun 2021. Kedua jejang pendidikan tersebut mengalami penurunan, namun untuk SMA/MA/SMK dan SMP/Mts/Paket B mengalami sedikit peningkatan persentase masing-masing dari 5,91 persen dan 3,89 persen menjadi 5,96 persen dan 4,00 persen. Dalam hal ini terjadi sedikit pergeseran.

Grafik 3.3 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke atas yang Masih Sekolah, 2020-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021

Ketenagakerjaan

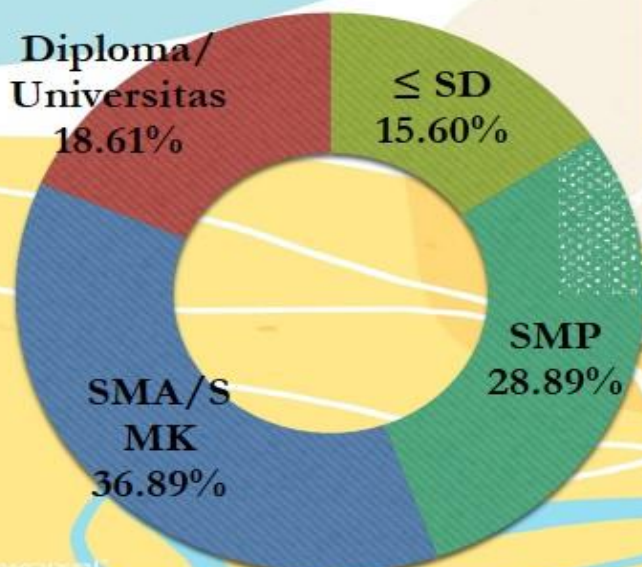
Jumlah Angkatan Kerja 292.252 orang

Jumlah Penduduk Usia Kerja 472.956 orang

Jumlah Penduduk Bekerja 254.059 orang

Jumlah pekerja formal dan informal sebanyak 159.764 orang dan 94.295 orang

Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) : 13,07 %

13,25 %

12,77 %

Sakernas Agustus 2021

Ketenagakerjaan

Permasalahan di bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu masalah terbesar yang menjadi perhatian pemerintah. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja merupakan sebagian kecil dari berbagai masalah yang dihadapi pemerintah.

Data dan informasi ketenagakerjaan sangat penting bagi penyusunan kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan wilayah dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Kebijakan, strategi dan program ketenagakerjaan yang baik dan benar sangat ditentukan oleh kondisi ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan. Selain itu, data dan informasi mengenai ketenagakerjaan juga dapat mencerminkan tingkat pencapaian pembangunan yang telah dilaksanakan.

Bab ini menjelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi ketenagakerjaan. Sumber data penghitungan indikator ini diperoleh dari Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) tahun 2020 dan 2021 kondisi Agustus. Indikator tersebut, antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), persentase pengangguran menurut tingkat pendidikan, persentase penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan, persentase penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha dan jumlah jam kerja, serta persentase pekerja menurut kelompok upah/ gaji/pendapatan bersih.

4.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

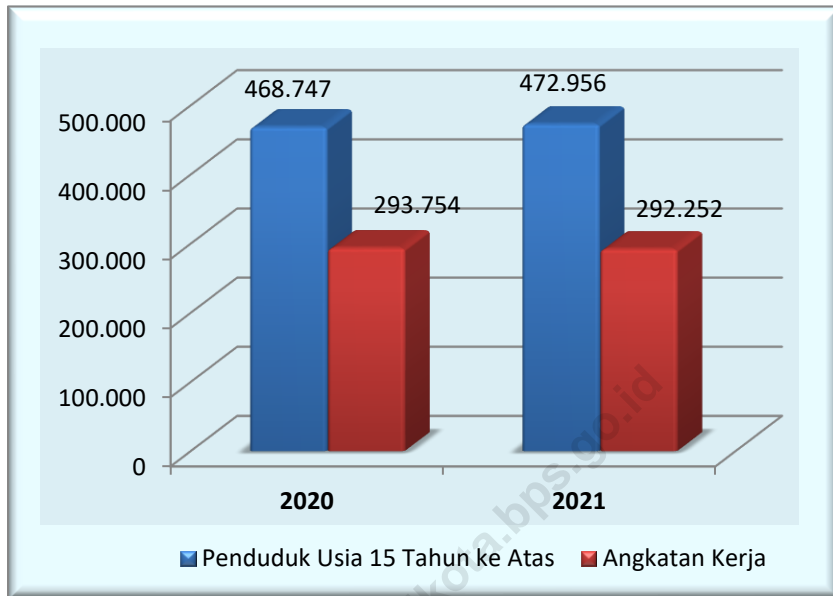
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang penting yang digunakan untuk menganalisa dan mengukur capaian hasil pembangunan. TPAK digunakan untuk mengukur besarnya jumlah angkatan kerja, indikator ini merupakan rasio antara

jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (usia produktif 15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan rasio antara jumlah penganggur terhadap jumlah angkatan kerja.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori usia kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Penduduk usia kerja (lebih dari 15 tahun) di Kota Cimahi 2021 sebanyak 472.956 orang, bertambah sebanyak 4.209 orang dibandingkan 2020 yang mencapai 468.747 orang. Adapun jumlah angkatan kerja (penduduk usia kerja yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran) pada 2021 mencapai 292.252 orang, berkurang sebanyak 2.502 orang dibanding 2020 yang mencapai 293.754 orang.

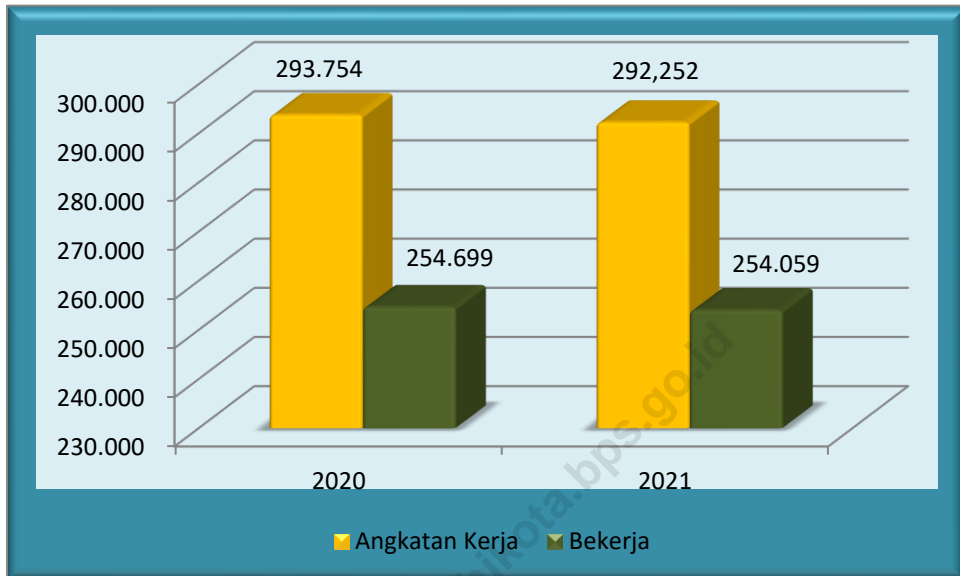
Grafik 4.1 Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas dan Angkatan Kerja di Kota Cimahi, Tahun 2020 – 2021



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

Dari total angkatan kerja sebanyak 292.252 orang pada Tahun 2021, sebanyak 86,93 persen atau sebanyak 254.059 orang melakukan aktivitas bekerja. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/ kegiatan ekonomi.

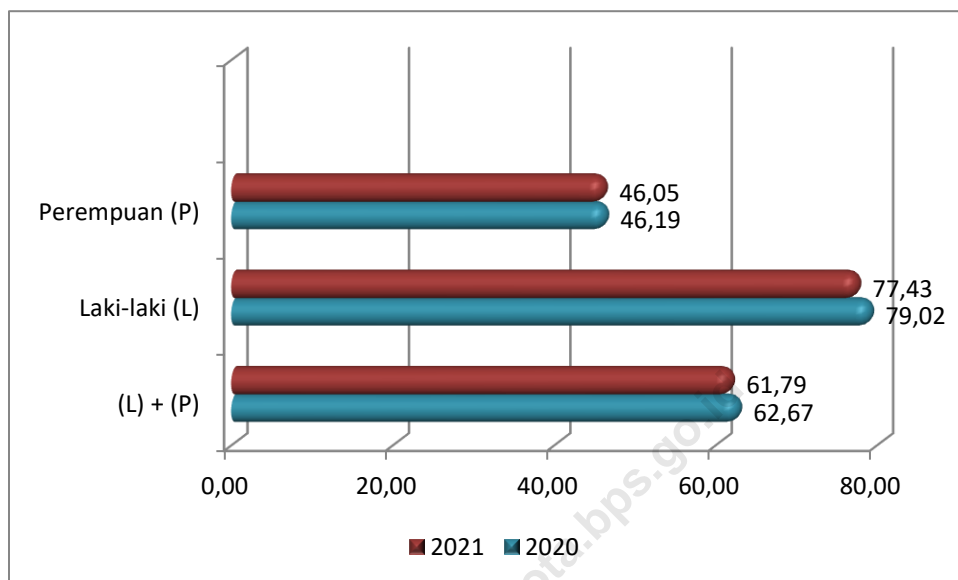
**Grafik 4.2 Jumlah Angkatan Kerja dan Penduduk Bekerja di Kota Cimahi,
Tahun 2020-2021**



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Cimahi tahun 2021 bergerak turun dibanding tahun 2020. TPAK Kota Cimahi tahun 2020 sebesar 62,67 persen, sedangkan tahun 2021 sebesar 61,79 persen. Penurunan tersebut terjadi arena adanya penurunan jumlah penduduk angkatan kerja dan meningkatnya penduduk usia kerja pada tahun 2021. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa baik tahun 2020 maupun tahun 2021 TPAK laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2021 TPAK laki-laki di Kota Cimahi mencapai 77,43 persen sedangkan TPAK perempuan 46,05 persen.

Grafik 4.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2020 – 2021 (Persen)



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

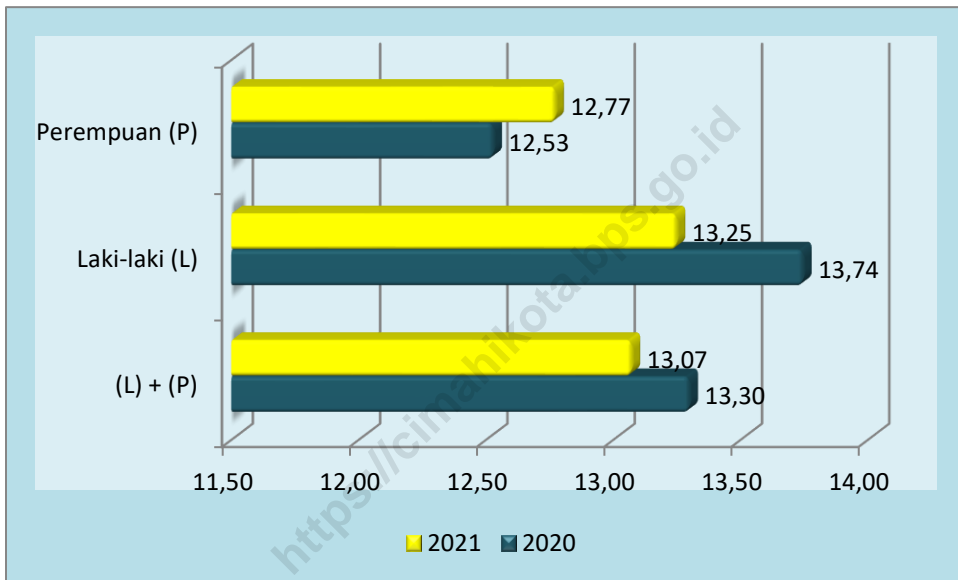
TPAK laki-laki maupun TPAK perempuan tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. TPAK laki-laki Kota Cimahi Tahun 2021 diperoleh dari rasio jumlah angkatan kerja laki-laki sebanyak 183.729 orang terhadap penduduk laki-laki usia kerja sebanyak 237.282 orang. TPAK perempuan tahun 2021 diperoleh dari rasio jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 108.523 orang terhadap penduduk laki-laki usia kerja sebanyak 235.674 orang.

Berdasarkan aspek pengangguran, jumlah penduduk yang menganggur, baik yang pernah bekerja maupun yang tidak pernah bekerja pada tahun 2020 sebanyak 39.055 orang. Pada tahun 2021 menurun sebesar 2,21 persen atau berkurang sebanyak 862 orang menjadi 38.193 orang. Hal tersebut menjadi salah satu sebab Nilai Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) Kota Cimahi tahun 2021 menurun menjadi 13,07 persen, tahun sebelumnya mencapai 13,30 persen. Meski masih kondisi Pandemi Covid-19 perekonomian mulai mengalami pertumbuhan positif, meski masih belum sepenuhnya pulih.

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penganggur laki-laki tahun

2020 di Kota Cimahi sebanyak 25.545 orang, yang kemudian berkurang 1.209 orang menjadi 24.336 orang pada tahun 2021. Sedangkan jumlah penganggur perempuan tahun 2020 sebanyak 13.510 orang dan tahun 2021 meningkat menjadi 13.857 orang. Pada tahun 2020 maupun 2021, TPT laki-laki lebih tinggi dari TPT perempuan yaitu TPT Laki-laki sebesar 13,25 persen dan TPT Perempuan sebesar 12,77 persen.

Grafik 4.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Cimahi, Tahun 2020 – 2021



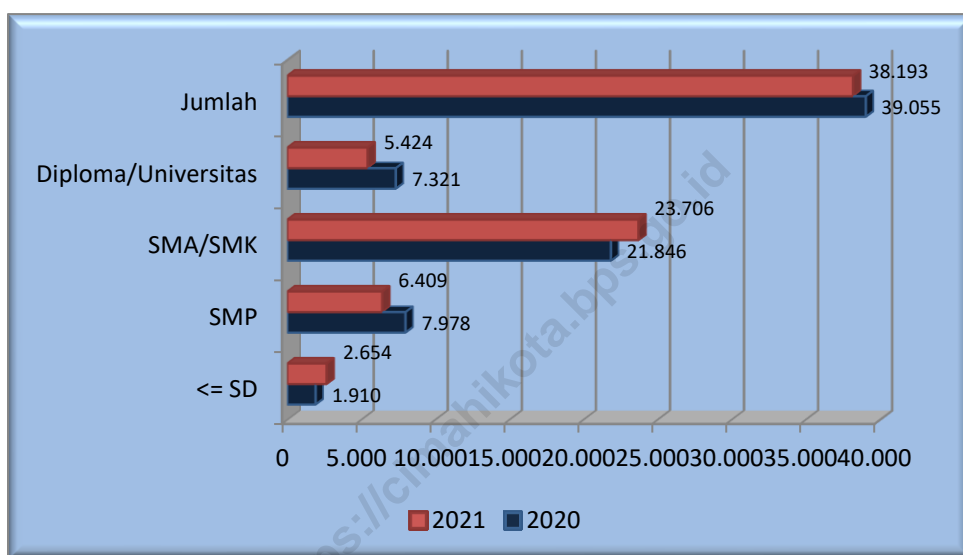
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

4.2 Tingkat Pengangguran dan Tingkat Pendidikan

Setiap individu berharap dirinya akan mudah mendapatkan pekerjaan layak sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang akan berdampak pada semakin tinggi pula harapan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan tingkat pendidikannya. Namun, keterbatasan lapangan kerja yang tersedia bagi yang mempunyai ijazah tinggi menyebabkan tidak terserapnya tenaga kerja pada lapangan usaha sesuai dengan yang diinginkan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan pengangguran pada tingkat pendidikan \leq SD dan SMA yaitu sebesar 38,95 persen

dan 8,51 persen. Sedangkan pengangguran dengan pendidikan SMP dan diploma/universitas yang menurun 19,67 persen dan 25,91 persen. Secara total jumlah pengangguran tahun 2021 menurun sebesar 2,21 persen dibandingkan tahun 2020 yaitu 39.055 orang menjadi 38.193 orang.

Grafik 4.5 Jumlah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2020-2021



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

Jumlah pengangguran di Kota Cimahi tahun 2021 yang paling banyak adalah berijazah SLTA/Sederajat yaitu mencapai 23.706 orang, terjadi peningkatan jumlah pengangguran sebanyak 1.860 orang dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 21.846 orang. Demikian juga untuk tingkat pendidikan SD/Sederajat ke bawah meningkat, bertambah sebanyak 744 orang dari 1.910 orang menjadi 2.654 orang. Sedangkan untuk mengalami SLTP/Sederajat dan Diploma/Universitas masing-masing menurun sebanyak 1.569 dan 1.897 orang, yaitu dari 7.978 dan 7.321 orang menjadi 6.409 dan 5.424 orang.

Tingginya tingkat pengangguran pada penduduk berijazah SLTP/Sederajat sampai yang memiliki ijazah Diploma I/II/III/Sarjana merupakan tantangan tersendiri

bagi Pemerintah Kota Cimahi. Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2012, Pemerintah Kota Cimahi telah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun, meningkat dari sebelumnya yang hanya 9 tahun. Memacu tingkat pendidikan masyarakat tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja, agar potensi yang dimiliki dapat berkontribusi positif dalam pembangunan.

Tahun 2020 TPT penduduk Kota Cimahi menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan seluruhnya mengalami penurunan, kecuali TPT untuk tingkat pendidikan \leq SD dan tingkat pendidikan SMA/Sederajat mencapai 7,08 persen dan 16,74 persen, mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang mencapai 4,86 persen dan 15,54 persen. TPT penduduk tamat SMP dan Diploma/Universitas menurun masing-masing mencapai dari 15,21 persen dan 11,92 persen menjadi 13,11 persen dan 8,44 persen tahun 2021 (Tabel 4.1). Hal ini mengindikasikan dalam periode setahun jumlah tenaga kerja lulusan SMA sederajat banyak yang belum terserap oleh lapangan usaha.

Tabel 4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2020 – 2021

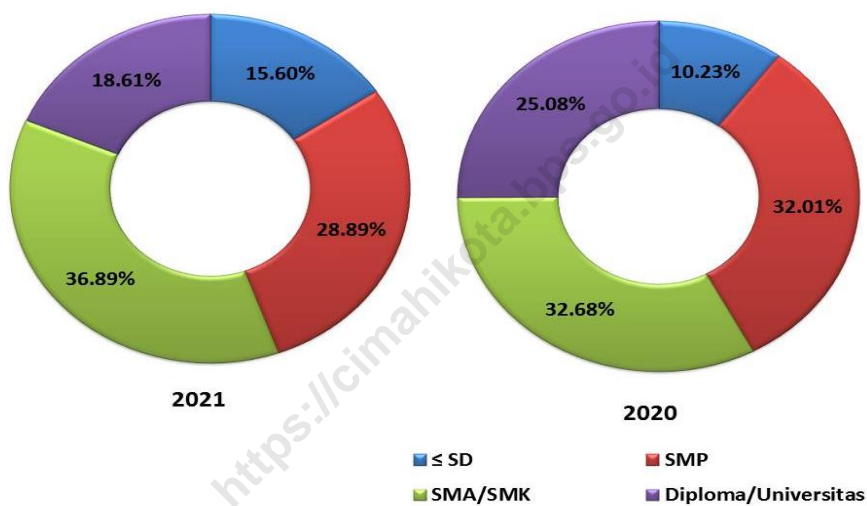
Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan	2020	2021
(1)	(2)	(3)
\leq SD	4,86	7,08
SMP	15,21	13,11
SMA/SMK	15,54	16,74
Diploma/Universitas	11,92	8,44
Jumlah	13,30	13,07

Sumber : Sakernas Agustus 2020* dan 2021 *Revisi

Dilihat dari komposisi penganggur menurut tingkat pendidikan, terdapat sedikit pergeseran kontribusi terhadap total pengangguran terbuka. Penganggur lulusan SLTA/ sederajat masih memegang kontribusi terbesar yaitu mencapai 36,89 persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai

32,68 persen. Penganggur dengan tingkat pendidikan SMP turun signifikan yaitu mencapai 28,89 persen dari 32,01 persen, sedangkan pada Diploma/Universitas mencapai 18,61 persen dari total pengangguran terbuka. Perlu upaya keras dari berbagai pihak melihat fenomena tersebut, dimana idealnya lulusan Diploma I/II/III/Sarjana dan lulusan SLTA/ sederajat akan lebih mudah dalam memasuki dunia kerja.

Grafik 4.6 Persentase Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Cimahi, 2020 - 2021



Sumber : Sakernas Agustus 2020* dan 2021

*Revisi

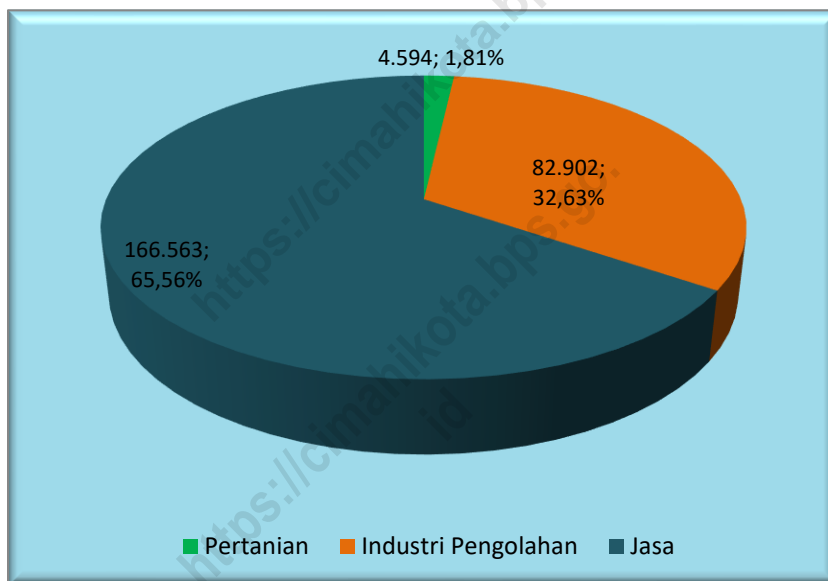
Hal tersebut diharapkan menjadi catatan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan serta membuka lapangan kerja bagi kelompok tersebut. Dengan pembukaan lapangan kerja baru bagi penduduk di daerahnya sendiri akan menurunkan angka urbanisasi dan diharapkan dapat turut serta dalam pembangunan di daerahnya masing-masing. Sedangkan untuk penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi yang belum terserap lapangan kerja diharapkan dapat berpartisipasi dengan berwirausaha sehingga dapat turut serta membangun perekonomian di daerah. Peran pemerintah daerah dalam hal ini adalah mendorong dan memberi insentif bagi mereka yang berinisiatif untuk membuka peluang berwirausaha.

4.3 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada publikasi ini dibagi menjadi 3 lapangan usaha yaitu Pertanian (pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan), Industri Pengolahan, dan Jasa.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas, Agustus 2021) terlihat sebanyak 82.902 orang atau 32,63 persen tenaga kerja terserap pada sektor industri pengolahan dan 166.563 orang atau sekitar 65,56 persen tenaga kerja terserap pada sektor jasa. Sedangkan sisanya yakni sebanyak 4.594 orang atau 1,81 persen tenaga kerja terserap pada sektor pertanian.

Grafik 4.7 Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Pekerjaan di Kota Cimahi, Agustus 2021

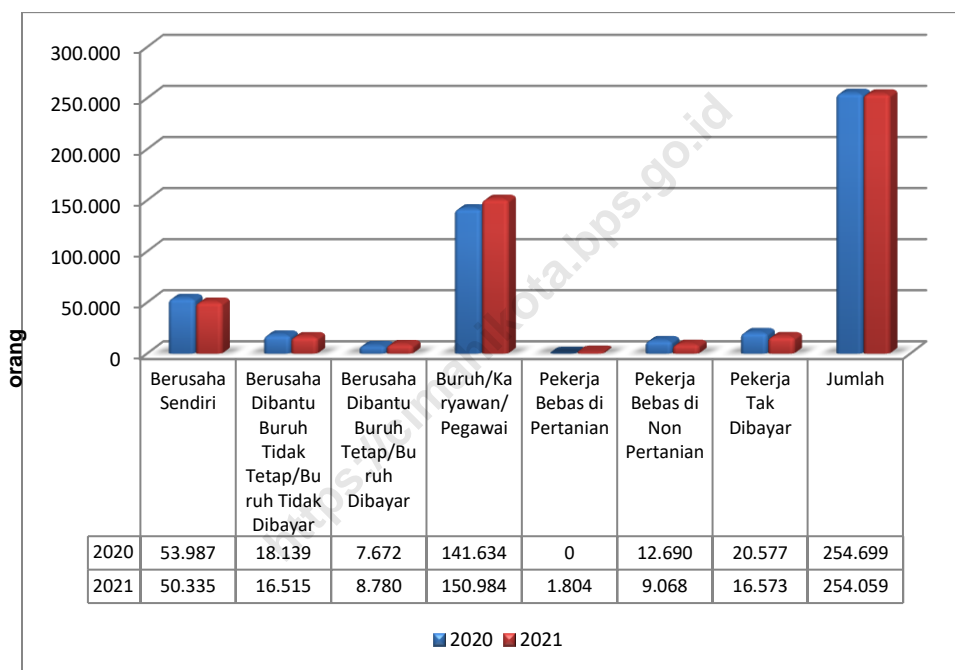


Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Provinsi Jawa Barat Agustus 2021

Sektor pertanian terdiri atas lima subsektor, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan dan hasilnya, dan subsektor perikanan. Namun, karena lahan pertanian di Kota Cimahi yang semakin sempit membuat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanianpun sedikit. Tenaga kerja di sektor industri pengolahan cukup besar, terserap pada industri besar/edang ataupun

UKM. Tenaga kerja pada sektor jasa merupakan yang terbesar, dalam hal ini terdiri dari sektor perdagangan, rumah makan dan hotel, sektor jasa kemasyarakatan dan sektor selain yang telah disebutkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor ini mampu memberikan lapangan kerja yang lebih luas atau tingkat kesempatan kerja yang relatif lebih besar.

Grafik 4.8 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Cimahi, 2020 – 2021



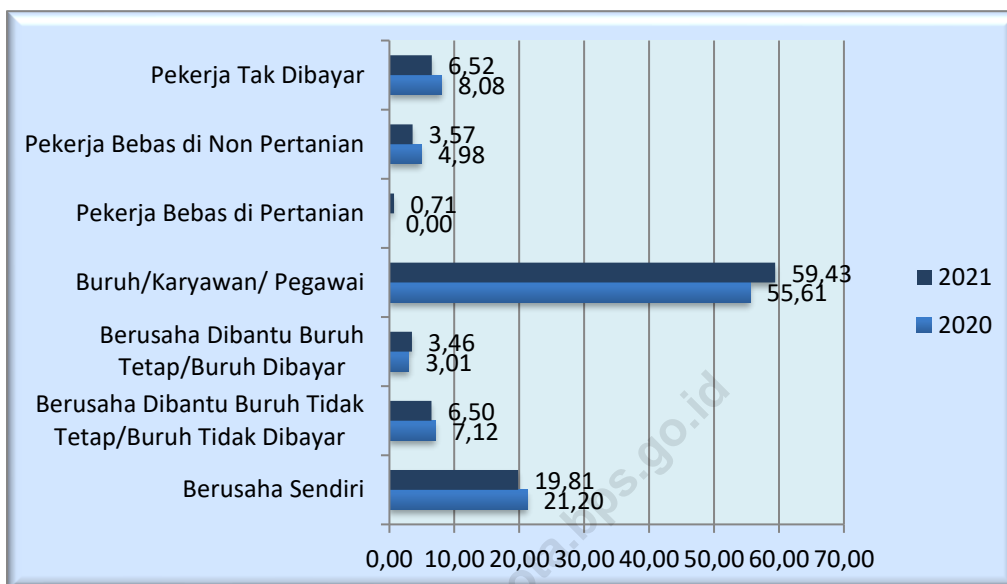
Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

Selama tahun 2020 hingga 2021 jumlah penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan masih lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang bekerja sebagai buruh/karyawan pada 2021 mencapai 150.984 orang atau sebesar 59,43 persen. Bila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 9.350 orang atau sebesar 6,60 persen. Pekerja bebas di pertanian tahun ini sebanyak 1.804 orang, juga mengalami kenaikan yang signifikan, ada indikasi pekerja bebas non pertanian memanfaatkan waktunya beralih untuk

mengembangkan budidaya tanaman hias. Penurunan terjadi pada tenaga kerja yang berstatus berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, pekerja bebas di non pertanian dan pekerja tak dibayar mengalami penurunan masing-masing sebanyak 3.652 orang, 1.624 orang, 3.622 orang dan 4.004 orang atau masing-masing turun sebesar 6,76 persen, 8,95 persen, 2,85 persen dan 19,46 persen. Jumlah penduduk bekerja menurut status pekerjaan utama di Kota Cimahi tahun 2020 – 2021 terlihat pada grafik 4.8.

Fenomena ini menunjukkan bahwa mulai terjadi pergeseran status pekerja, meski masih terjadi pandemi covid-19, namun pekerja berusaha sendiri maupun pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar mulai kembali bekerja pada kegiatan ekonomi sebagai buruh/karyawan. Tahun 2021 perekonomian sudah bergerak positif, sehingga perusahaan mulai kembali mempekerjakan karyawannya. Pergeseran tersebut terlihat dari struktur status pekerjaan utama penduduk bekerja di Kota Cimahi tahun 2020 – 2021. Persentase jumlah pekerja dengan status sebagai buruh tahun 2020 adalah sebesar 59,43 persen, sedangkan tahun 2020 mencapai 55,61 persen. Struktur sedikit bergeser pada berusaha sendiri, pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar, pekerja yang berkerja sendiri dibantu pekerja keluarga/tidak dibayar dan pekerja bebas di non pertanian yang mengalami penurunan menjadi sebesar 19,81 persen, 6,52 persen, 6,50 persen dan 3,57 persen. Pada tahun sebelumnya, masing-masing hanya mencapai 21,20 persen, 8,08 persen, 7,12 persen dan 4,98 persen.

Grafik 4.9 Struktur Status Pekerjaan Utama Penduduk Bekerja di Kota Cimahi, 2020 – 2021



Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

4.4 Sektor Formal dan Sektor Informal

Konsep informal yang digunakan dalam publikasi ini mengacu pada kesepakatan dalam ICLS ke-17 (17th *International Conference on Labor Statisticians*) tahun 2003. Sektor informal adalah sekelompok unit produksi yang merupakan bagian dari sektor rumah tangga, atau apa yang disebut sebagai usaha rumah tangga tidak berbadan hukum (*Household Unincorporated Enterprise*)

ICLS ke-17 mendefinisikan pekerja informal sebagai “karyawan dianggap memiliki pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, tidak dikenakan pajak pendapatan, minimnya perlindungan sosial atau hak tertentu untuk jaminan kerja (seperti pemberitahuan pemecatan sebelumnya, sistem pembayaran gaji tanpa rincian/nota, atau tiadanya hak cuti, ijin sakit, dll)”. Perlu diketahui bahwa definisi ini dibuat untuk konsep pekerjaan dan bukan untuk tenaga kerja karena setiap orang dapat secara bersamaan memiliki dua pekerjaan atau lebih.

Pekerjaan informal dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua: (1) usaha sendiri informal dan (2) pekerjaan upahan informal yang dipekerjakan di usaha formal atau informal yang mencakup karyawan tanpa kontrak resmi, tanpa jaminan ketenagakerjaan atau perlindungan sosial. Adapun yang termasuk usaha sendiri informal adalah pengusaha pada sektor informal, berusaha sendiri pada usaha informal, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Chen, 2006 seperti dikutip dalam Maligalig, dkk, 2008). Perbedaan ini menyarankan agar pekerja informal dibagi dalam seluruh kategori status pekerja: pengusaha, buruh, berusaha sendiri, pekerja keluarga tidak dibayar dan anggota koperasi/kemitraan produksi informal (Buku Pedoman Pencacah Survei Sektor Informal 2014, BPS). Dalam konteks ini Pekerja Informal (*Informal Employee*) merupakan pekerja yang berstatus berusaha sendiri dan pekerja bebas di sektor pertanian.

Tabel 4.2 Jumlah Pekerja Formal dan Informal di Kota Cimahi, Agustus 2020 – 2021

Uraian	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Jumlah Pekerja (orang)		
Formal	149.306	159.764
Informal	105.393	94.295
Jumlah	254.699	254.059
Persentase (%)		
Formal	58,62	62,88
Informal	41,38	37,12
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Barat Agustus 2020 dan 2021

Jumlah pekerja formal dan informal Kota Cimahi Tahun 2021 sebanyak 159.764 orang dan 94.295 orang atau sebesar 62,88 persen dan 37,12 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya pekerja formal naik sebesar 7,00 persen dari 149.306 orang. Sebaliknya pekerja informal turun sebesar 10,53 persen dari 105.393. Meski secara keseluruhan jumlah yang bekerja mengalami sedikit



penurunan sebesar 0,25 persen dari 254.699 orang menjadi 254.059 orang. Peningkatan pekerja formil tersebut sebagai bentuk respon dari kondisi perbaikan kondisi pada Agustus 2021, dimana perekonomian mulai bergerak positif meski belum pulih. Beberapa sektor formil seperti industri dan beberapa setor lainnya mulai meningkatkan produksi dan mempekerjakan pekerja yang sementara dirumahkan atau diurangi jam kerjanya.

<https://cimahikota.bps.go.id>

Pola Konsumsi



Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada tahun 2021 adalah sebesar **Rp 1.827.072,-** atau naik sebesar 1,0 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai **Rp 1.808.790,-**.

2020	2021	
786.372 (43,5 %)	772.401 (42,3%)	 Makanan
1.022.418 56,5%	1.054.671 57,7%	 Non Makanan

Sub kelompok makanan dan minuman jadi memiliki kontribusi tertinggi terhadap pengeluaran kelompok makanan yaitu sebesar **39 persen (Rp. 298.567,-)**.



Sub kelompok perumahan dan fasilitas rumah memiliki kontribusi tertinggi terhadap pengeluaran kelompok non makanan yaitu sebesar **48 persen (Rp. 507.770,-)**.



Taraf dan Pola Konsumsi

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut.

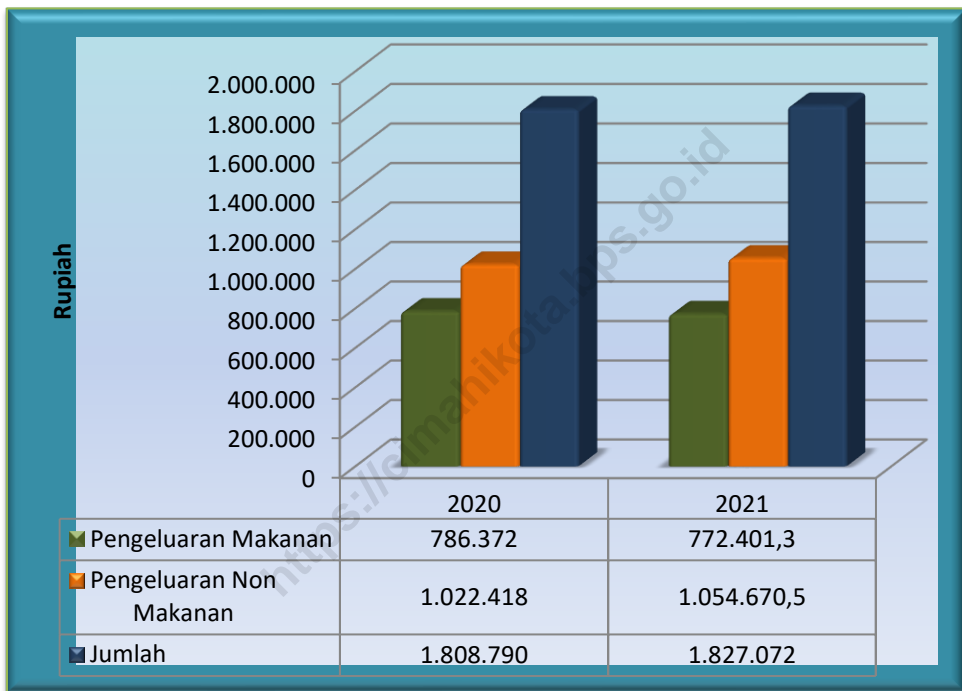
Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga tersebut berpenghasilan rendah. Makin tinggi penghasilan rumah tangga, maka makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain rumah tangga/keluarga cenderung semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan.

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 1.808.790,- atau naik sebesar 1,0 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.827.072,-. Pada tahun 2020 pengeluaran non makanan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pengeluaran makanan mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dipahami, bahwa meski masih masa pandemi covid-19, tahun 2021 perekonomian yang mulai bergerak positif, meski belum pulih.

Masyarakat Kota Cimahi mulai meningkat daya belinya sehingga pengeluaran non makanan mulai bergerak naik dibandingkan dengan pengeluaran. Rata-rata pengeluaran non makanan dan yaitu masing-masing sebesar Rp 1.054.671,- dan Rp 772.401,-, atau sebesar 57,7 persen dan 42,3 persen terhadap total pengeluaran.

Grafik 5.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Komoditas di Kota Cimahi, 2020 - 2021



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2020 dan 2021

Tabel 5.1 Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Pengeluaran dan Kelompok Komoditas (Rupiah) di Kota Cimahi, 2021

Kelompok Pengeluaran	Kelompok Komoditas		Jumlah
	Makanan	Non Makanan	
(1)	(2)	(3)	(4)
40 Persen Terbawah	438,437	300,490	738,927
40 Persen Tengah	810,186	800,757	1,610,943
20 Persen Teratas	1,364,817	3,073,590	4,438,407
Rata-rata	772,401	1,054,670	1,827,072

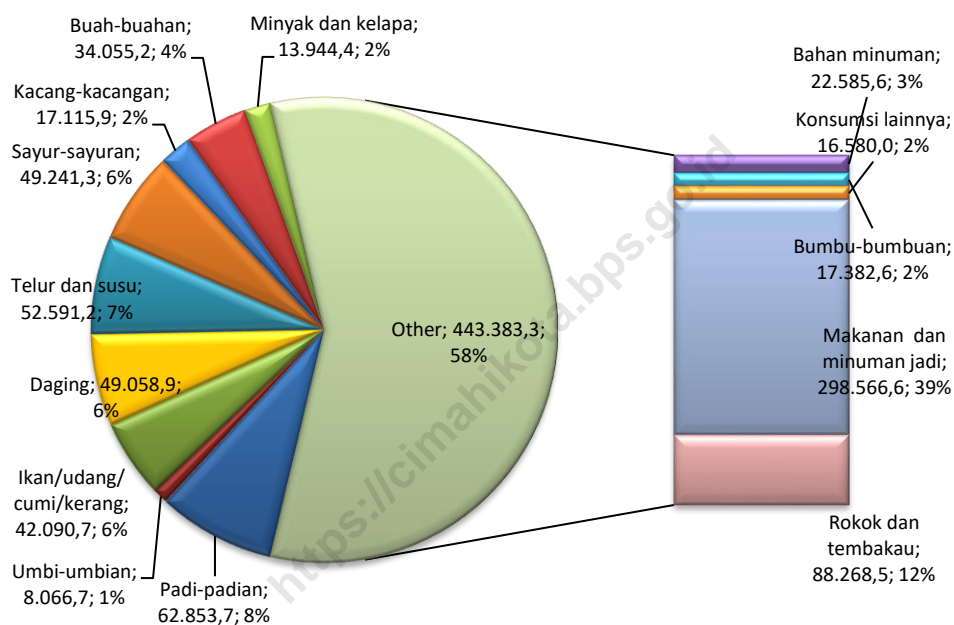
Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Cimahi 2020 dan 2021

Tabel 5.1 menyajikan pengeluaran rata-rata per kapita sebulan menurut kelompok pengeluaran dan kelompok barang. Berdasarkan tabel ini terlihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Kota Cimahi sebesar Rp. 1.827.072,- yang dibagi menjadi Rp. 1.054.670,- untuk bukan makanan dan Rp. 772.401,- untuk makanan. Jika dilihat berdasarkan kelompok pengeluaran, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan kelompok pengeluaran 40 persen terbawah lebih banyak digunakan untuk makanan. Pengeluaran kelompok 40 persen tengah relatif berimbang untuk makanan dan non makanan. Sedangkan untuk kelompok pengeluaran 20 persen teratas, pengeluaran non makanan jauh lebih besar dari pengeluaran makanan.

Grafik 5.2 memperlihatkan proporsi pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang makanan. Jika kelompok makanan dirinci menurut sub kelompoknya, terlihat bahwa sub kelompok makanan dan minuman jadi merupakan sub kelompok dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pengeluaran kelompok makanan yaitu sebesar 39 persen (Rp. 298.567,-). Diikuti sub kelompok tembakau dan sirih sebesar 12 persen (Rp. 88.268,-) dan padi-padian sebesar 8 persen (Rp. 62.834,-). Hal ini memperlihatkan bahwa penduduk Kota

Cimahi banyak mengkonsumsi makanan jadi. Fenomena ini dapat menyebabkan pelaku ekonomi semakin mengembangkan inovasi untuk menciptakan berbagai kuliner makanan khas Kota Cimahi

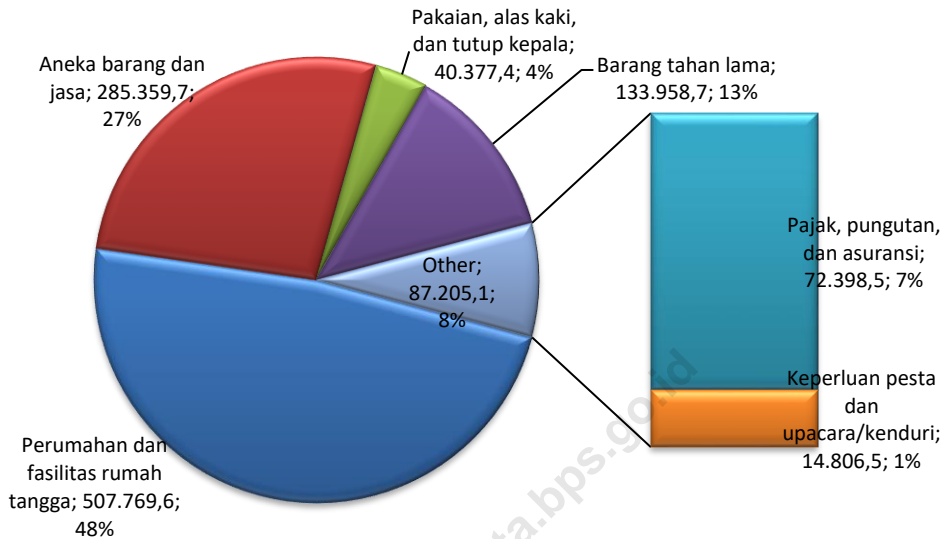
Grafik 5.2 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Makanan di Kota Cimahi, 2021



Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2021

Grafik 5.3 memperlihatkan proporsi pengeluaran rata-rata menurut kelompok barang non makanan. Jika kelompok non makanan dirinci menurut subkelompoknya, terlihat pada bahwa pengeluaran subkelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga merupakan subkelompok dengan rata-rata pengeluaran per kapita yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pengeluaran kelompok non makanan yaitu sebesar 48 persen (Rp 507.770). Diikuti sub kelompok aneka barang dan jasa sebesar 27 persen (Rp 285.360) dan sub kelompok barang tahan lama sebesar 13 persen (Rp 133.959).

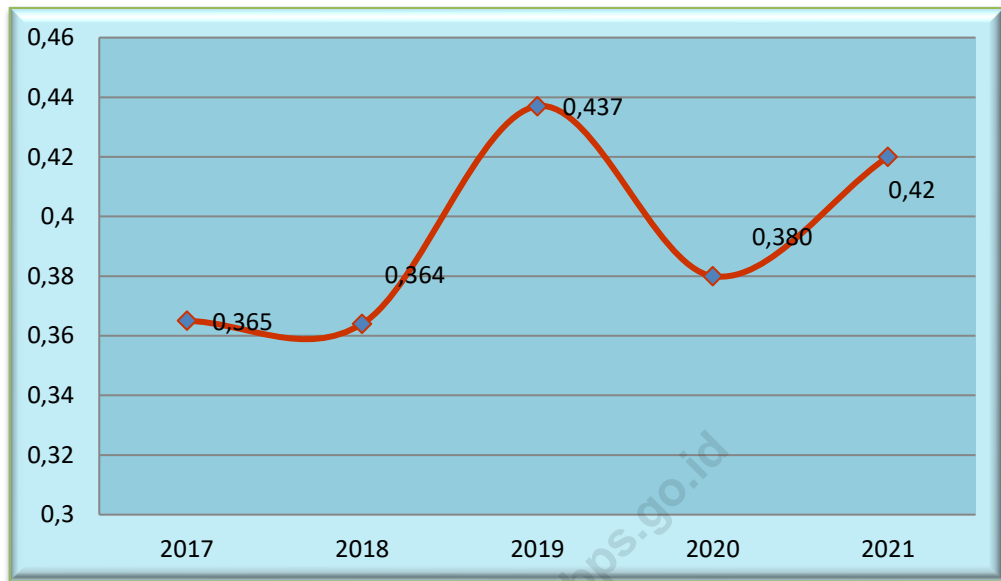
Grafik 5.3 Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Barang Non Makanan di Kota Cimahi, 2021



Sumber : Pola Konsumsi Penduduk Jawa Barat 2021

Data pengeluaran digunakan sebagai *proxy* untuk penghitungan distribusi pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi. Peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan, karena pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan indikator yang sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Grafik 5.4 Indeks Gini Menurut Kota Cimahi, 2017 – 2021



Sumber : Tabel Dinamis Gini Rasio Jawa Barat Menurut Kabupaten/Kota

Jika dilihat dari grafik 5.2, indeks gini Kota Cimahi mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017 dengan indeks gini rasio mencapai 0,365 dan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2018 menjadi 0,364. Namun pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 0,437. Pada tahun 2020, indeks gini Kota Cimahi mencapai 0,380, dan tahun 2021 kembali meningkat menjadi 0,42. Dengan melihat angka ini, pemerataan pendapatan masyarakat di Kota Cimahi ada pada tingkat ketimpangan sedang. Semakin tinggi angka Indeks Gini Rasio, maka semakin menunjukkan besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat di suatu wilayah.



Perumahan

Atap beton,
genteng dan
asbes **99,16 %**

Dinding terluas
tembok dan
kayu **99,93 %**



Rata-rata luas lantai
per kapita $\geq 10 \text{ m}^2$
66,24 %

Jamban
sendiri
82,45 %

Jamban sendiri
dengan tangki
Septik **80,38 %**

Air minum
bersih
98,70 %

Sumber
penerangan
listrik PLN
100,00 %

Fasilitas
Perumahan

Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah **milik sendiri** sebesar **54,10 %**, sisanya **46,90 %** adalah bukan milik sendiri

<https://cimahikota.bps.go.id>

Perumahan dan Lingkungan

Fungsi rumah adalah sebagai tempat tinggal, selain itu rumah juga dapat menunjukkan status sosial seseorang. Status sosial seseorang berhubungan positif dengan kualitas/kondisi rumah. Status sosial seseorang yang semakin tinggi, peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik dan fasilitas yang lengkap semakin besar. Salah satu dari sekian banyak fasilitas yang dapat mencerminkan kesejahteraan rumah tangga adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding dan lantai terluas yang digunakan, termasuk juga fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar, dan sumber penerangan. Kualitas perumahan yang baik dan penggunaan fasilitas perumahan yang memadai akan memberikan kenyamanan bagi penghuninya.

6.1 Kualitas Rumah Tinggal

Terdapat beberapa kriteria rumah tinggal yang harus dipenuhi sehingga dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal. Kriteria tersebut diantaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

Tabel 6.1 Rumah Tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan, 2020 – 2021

Indikator (1)	Satuan (2)	2020 (3)	2021 (4)
Atap beton, genteng dan asbes	%	98,37	99,16
Dinding terluas tembok dan kayu	%	99,81	99,93
Rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m ²	%	63,46	66,24

Sumber : Susenas, 2020 dan 2021

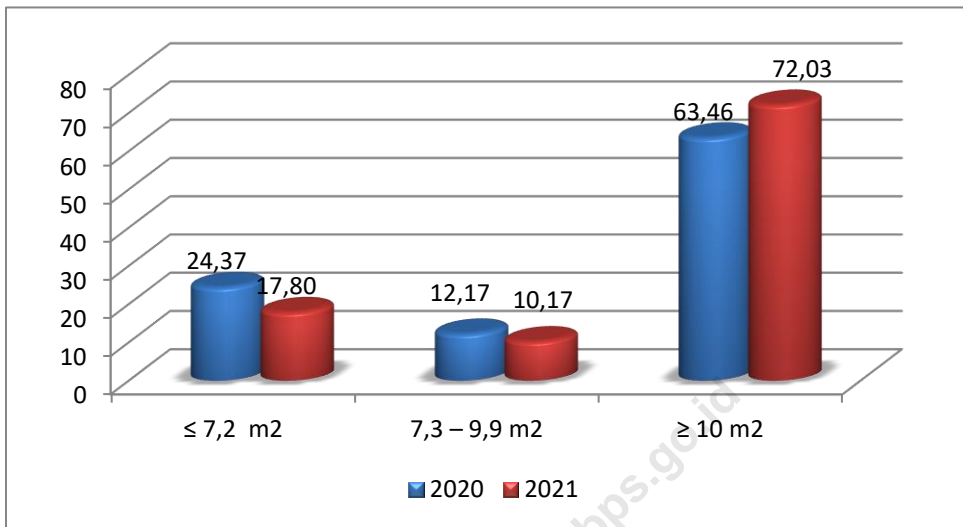
Indikator yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Berdasarkan hasil Susenas 2020 rumah tinggal dengan atap beton, genteng, dan asbes mencapai 98,37 persen dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 99,16 persen, sedangkan pada kondisi bangunan rumah tinggal yang menggunakan dinding terluas tembok dan kayu naik dari 99,81

persen menjadi 99,93 persen pada tahun 2021.

Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan salah satu kriteria rumah sehat adalah rumah tinggal yang memiliki luas lantai per orang minimal 10 m². Ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RS Sehat) menurut Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia di dalam rumah yang meliputi aktifitas tidur, makan, kerja, duduk, mandi, kakus, cuci dan masak serta ruang gerak lainnya. Berdasarkan hasil kajian, kebutuhan ruang per orang adalah 9 m² dengan perhitungan ketinggian rata-rata langit-langit adalah 2,80 m. Selanjutnya menurut Kementerian Kesehatan, rumah dapat dikatakan memenuhi salah satu persyaratan sehat adalah jika penguasaan luas lantai per kapitanya minimal 8 m².

Data hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa di Kota Cimahi persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m² adalah sebesar 63,46 persen. Jika dibandingkan dengan data tahun 2019, maka terjadi penurunan persentase rumah tangga yang memiliki rata-rata luas lantai per kapita ≥ 10 m² yang mencapai 67,51 persen. Penurunan ini kemungkinan disebabkan adanya pengaruh pandemi covid-19, dimana banyak pekerja/buruh yang terpaksa kembali ke rumah orang tua karena terkena PHK dan menjadi pekerja keluarga/tidak dibayar. Kemungkinan lainnya adalah pada kondisi perekonomian saat ini mengharuskan masyarakat harus lebih mengurangi pengeluaran untuk menyewa rumah dengan mencari rumah lebih murah/lebih kecil.

Grafik 6.1 Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita di Kota Cimahi, 2020 – 2021



Sumber : Susenas, 2020-2021

Persentase rumah tangga menurut luas lantai perkapita di Kota Cimahi dapat dilihat pada Grafik 6.1. Berdasarkan Grafik tersebut terlihat terjadi penurunan persentase rumah tangga dengan luas lantai $\geq 10 \text{ m}^2$ dan $7,3 - 9,9 \text{ m}^2$ pada tahun 2020. Sebaliknya, terjadi peningkatan persentase rumah tangga pada luas lantai per kapita $\leq 7,2 \text{ m}^2$ yaitu dari 19,91 persen menjadi 24,37 persen.

6.2 Fasilitas Rumah Tinggal

Fasilitas rumah tinggal merupakan pemenuhan atas kebutuhan aktivitas seluruh anggota rumah tangga. Kelengkapan fasilitas suatu rumah tinggal akan menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Fasilitas-fasilitas tersebut adalah tersedianya air bersih, sanitasi yang layak, serta penerangan yang baik. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari, terutama air bersih yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk keperluan minum dan masak.

Tabel 6.2. Rumah Tangga Menurut Beberapa Fasilitas Perumahan, 2020 - 2021

Indikator	Satuan	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Air minum bersih *)	%	91,92	98,70
Jamban sendiri	%	81,42	82,45
Jamban sendiri dengan tangki septik	%	70,19	80,38
Sumber penerangan listrik PLN	%	99,09	100,00

*) Terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja 10 m+

Sumber : Susenas, 2020 dan 2021

Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih pada tahun 2021 mencapai 98,70 persen. Air minum bersih terdiri dari air kemasan, air isi ulang, leding, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir tinja lebih dari 10 m.

Selain fasilitas ketersediaan air minum, penyediaan sarana jamban merupakan bagian dari usaha sanitasi yang cukup penting peranannya. Pembuangan kotoran manusia yang tidak sesuai dengan standar kesehatan akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Dampak lebih lanjut dapat menyebabkan berbagai macam penyakit seperti *thypus*, disentri, kolera, dan sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mencegah dan mengurangi kontaminasi terhadap lingkungan maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Salah satu fasilitas rumah tinggal yang berkaitan dengan hal tersebut adalah ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Selama tahun 2020-2021 persentase rumah tangga yang memiliki jamban sendiri mengalami peningkatan dari 81,42 persen menjadi 82,45 persen. Selanjutnya selain telah memiliki jamban sendiri, penggunaan jamban dengan tangki septik juga merupakan bagian dari kualitas kehidupan bagi rumah tangga dalam memenuhi salah satu kriteria rumah sehat. Pada tahun 2021 rumah tangga yang menggunakan jamban

dengan tangki septik sudah mencapai 80,38 persen atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 70,19 persen.

Selain air bersih dan jamban, fasilitas rumah tinggal lainnya yang juga penting adalah penerangan. Secara umum sumber penerangan utama berasal dari listrik baik dari PLN maupun Non PLN. Cahaya listrik lebih terang dibandingkan sumber penerangan lainnya. Hasil Susenas tahun 2020 menunjukkan bahwa 100,00 persen rumah tangga di Kota Cimahi telah menikmati fasilitas penerangan listrik PLN. Jika dipilah, rumah tangga yang menggunakan listrik dengan meteran sebanyak 89,96 persen dan 10,04 persen tidak menggunakan meteran.

6.3 Status Kepemilikan Rumah Tinggal

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan juga peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan rumah tinggal. Status kepemilikan rumah tinggal yang dicakup di sini adalah rumah milik sendiri, kontrak, sewa, bebas sewa, rumah dinas, rumah milik orang tua/saudara atau status kepemilikan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri dapat dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Hasil Susenas 2021 menunjukkan bahwa rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri sebesar 54,10 persen, sisanya 46,90 persen adalah bukan milik sendiri. Dalam hal ini terjadi sedikit pergeseran atau peningkatan persentase dari tahun sebelumnya dimana rumah milik sendiri sebesar 53,58 persen dan bukan milik sendiri sebesar 46,42 persen.

Tabel 6.3. Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Tinggal, 2020 - 2021

Indikator	Satuan	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	%	53,58	54,10
Bukan Milik Sendiri	%	46,42	46,90

Sumber : Susenas, 2020 dan 2021

<https://cimahikota.bps.go.id>

KEMISKINAN

Garis Kemiskinan

Rp 522.281,-

Rp /kapita/ Bulan

Penduduk Kota Cimahi yang memiliki pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan kurang dari Rp 522.281,- setiap bulannya dikategorikan sebagai penduduk miskin

Indeks Kedalaman
Kemiskinan (P1)

0.92

Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2)

0.21

KEMISKINAN

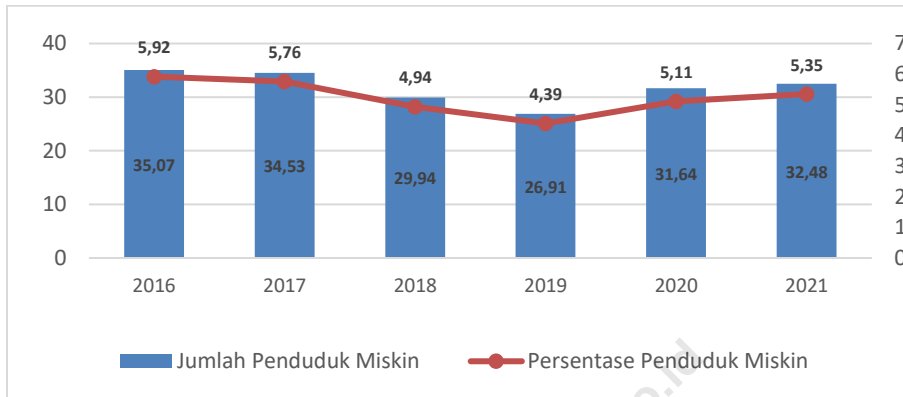
Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap daerah, termasuk Kota Cimahi.

Kemiskinan dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan, dan lainnya.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin

Selama kurun waktu 2019-2021, penduduk miskin di Kota Cimahi menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada tahun 2019 persentase penduduk miskin mencapai 4,39 persen, angka tersebut kemudian naik 0,72 poin di tahun 2020 menjadi 5,11 persen dan kembali meningkat sebesar 0,24 poin menjadi 5,35 persen. Peningkatan penduduk miskin baik dari sisi jumlah maupun persentase tidak terlepas dari pandemi Covid-19. Pandemi ini mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat dan perubahan perilaku pada kegiatan ekonomi sehingga memicu kemiskinan terutama pada penduduk yang berada dalam kategori rentan miskin.

Grafik 7.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Cimahi, 2016-2021 (Ribuan Jiwa)



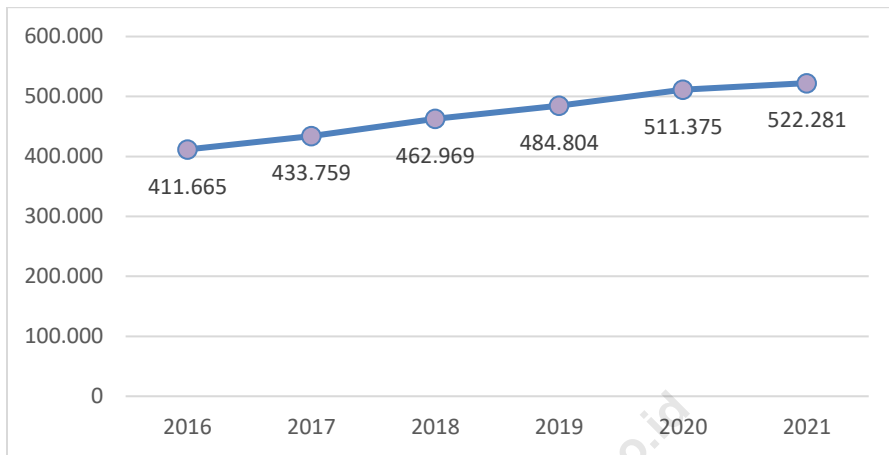
Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga ; kondisi perumahan ; dan persebarannya menurut kabupaten / kota. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.2 Garis kemiskinan (GK), Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Garis kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Garis kemiskinan merupakan jumlah uang minimal yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan bukan makanan per orang untuk satu bulan. Penduduk akan dikategorikan miskin jika rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan selalu mengalami peningkatan setiap tahun mengikuti kenaikan harga komoditas bahan makanan dan bukan makanan. Pada tahun 2021, garis kemiskinan di Kota Cimahi sebesar Rp 522.281 per kapita per bulan. Dengan kata lain biaya hidup tahun 2021 di Kota Cimahi juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2020.

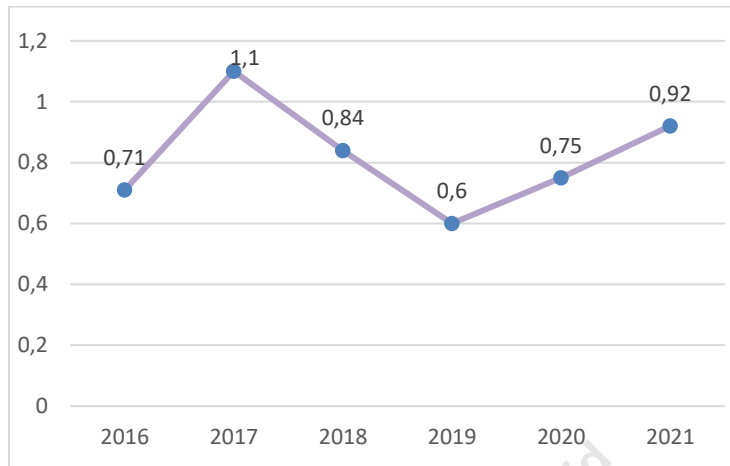
Grafik 7.2 Garis Kemiskinan Kota Cimahi, 2016-2021 (Rupiah / Kapita / Bulan)



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa barat 2021

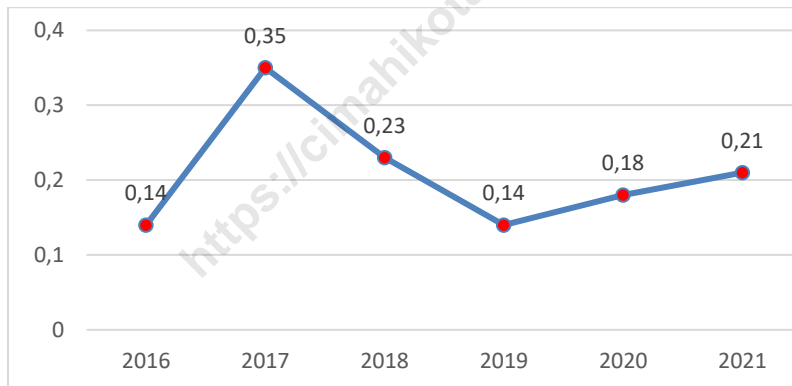
Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan (P1). Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Meningkatnya garis kemiskinan dan menurunnya pendapatan penduduk miskin menyebabkan indeks kedalaman kemiskinan pada tahun 2021 semakin tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan Kota Cimahi sebesar 0,60 naik 0,15 poin menjadi 0,75 pada tahun 2020 dan kemudian meningkat kembali 0,17 poin menjadi 0,92 pada tahun 2021.

Grafik 7.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kota Cimahi, 2016-2021



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

Grafik 7.4 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Cimahi, 2016-2021



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

Selain indeks kedalaman kemiskinan, ada indeks keparahan kemiskinan (P2) yang bisa digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran antar penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin. Pada periode 2019-2021, indeks keparahan kemiskinan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2019 indeks keparahan kemiskinan Kota Cimahi sebesar 0,14, naik 0,04 poin menjadi 0,18 pada tahun 2020, dan kemudian

meningkat kembali 0,03 poin menjadi 0,21 pada 2021.

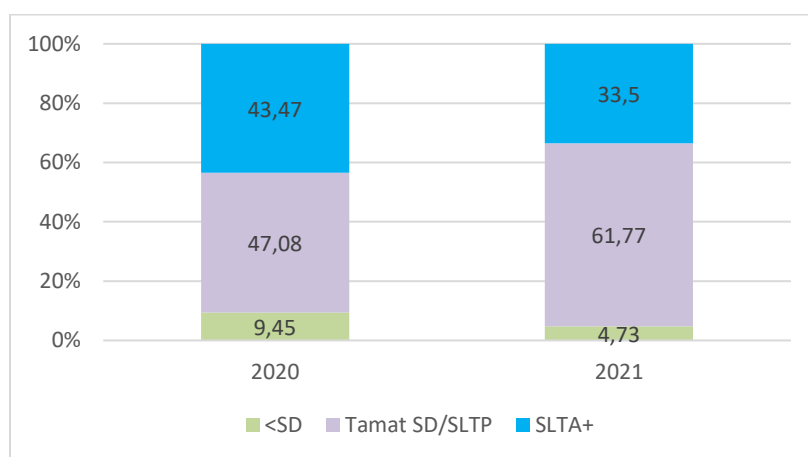
Selain indikator garis kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan ; karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi demografi, pendidikan, dan ketenagakerjaan dari kepala rumah tangga miskin serta kondisi perumahan. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar tepat sasaran.

7.3 Karakteristik Pendidikan

Perbaikan tingkat pendidikan memegang peranan penting dalam upaya pemberantasan kemiskinan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, idealnya akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dengan tingkat pendapatan yang lebih baik, dimana akan memperkecil peluang berada pada kondisi miskin.

Hal yang perlu diperhatikan dalam menangani pengentasan kemiskinan selain pendidikan kepala rumah tangga adalah pendidikan anak dari rumah tangga miskin. Anak dalam rumah tangga miskin apabila diberi kesempatan menempuh pendidikan yang lebih tinggi maka besar kemungkinan dapat keluar dari kemiskinannya di masa depan.

Grafik 7.5 Persentase Penduduk Miskin Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kota Cimahi, 2020-2021



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

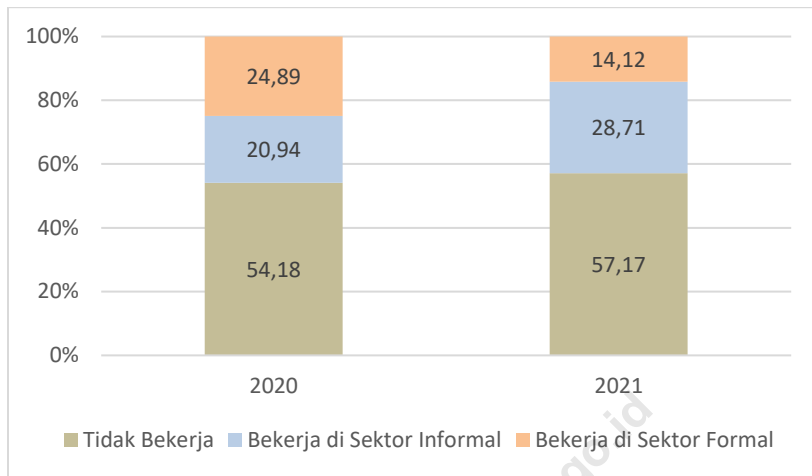
Persentase penduduk miskin di Kota Cimahi menurut pendidikan yang ditamatkan tahun 2021 menunjukkan sebagian besar penduduk miskin adalah tamat SLTP ke bawah. Sebanyak 61,77 persen penduduk miskin tamat SD/SLTP dan sederajat. Kemudian 4,73 persen penduduk miskin adalah tamat SD. Adapun penduduk miskin yang pendidikannya tamat SLTA / sederajat atau lebih sebanyak 33,50 persen. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesempatan rumah tangga untuk mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi menyebabkan rumah tangga tersebut rentan dengan kondisi miskin.

Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka terlihat adanya penurunan taraf pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk miskin pada tingkat SLTP ke bawah yang semula sebesar 47,08 persen. Demikian halnya terjadi penurunan taraf pendidikan yang ditamatkan bagi penduduk miskin pada tingkat SLTA ke atas, yang semula sebesar 43,47 persen

7.4 Karakteristik Ketenagakerjaan

Indikator kedua setelah pendidikan yang dapat digunakan untuk melihat karakteristik rumah tangga miskin yaitu ketenagakerjaan. Persentase penduduk miskin yang tidak bekerja mencapai 57,17 persen pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka mengalami peningkatan sebesar 2,99 persen

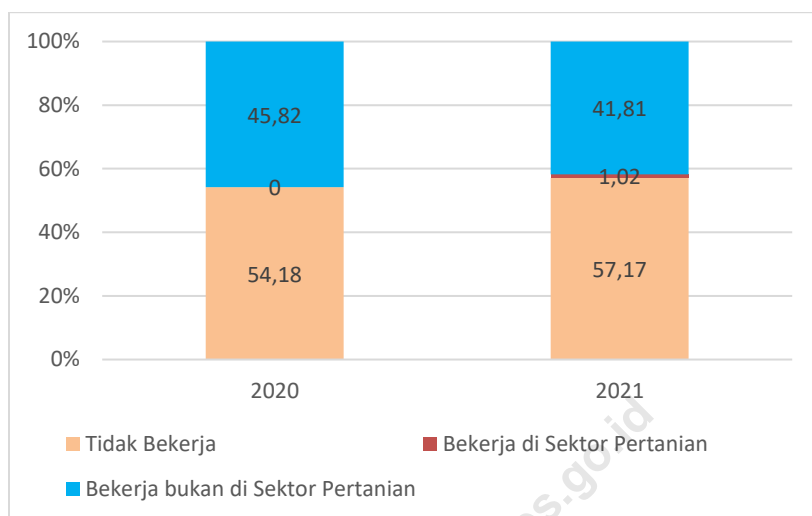
Grafik 7.6 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 tahun ke Atas Menurut Status Bekerja di Kota Cimahi, 2020-2021



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

Menurut status pekerjaannya , pada tahun 2021 penduduk miskin lebih banyak yang bekerja di sektor informal dibandingkan dengan sektor formal. Sebanyak 28,71 persen penduduk miskin bekerja di sektor informal. Sedangkan 14,12 persen bekerja di sektor formal. Dibandingkan dengan tahun 2020, persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor formal mengalami penurunan, berlawanan dengan persentase penduduk miskin yang bekerja di sektor informal justru mengalami peningkatan.

Grafik 7.7 Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja dan Bidang Pekerjaan di Kota Cimahi, 2020 – 2021



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

Pada tahun 2020 tidak ada penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian. Namun di tahun 2021 terdapat 1,02 persen penduduk miskin yang bekerja di sektor pertanian. Persentase penduduk yang bekerja bukan di sektor pertanian sebesar 41,81 persen pada tahun 2021. Dibandingkan dengan tahun 2020, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 4,01 persen dari semula 45,82 persen.

7.5 Karakteristik Perumahan

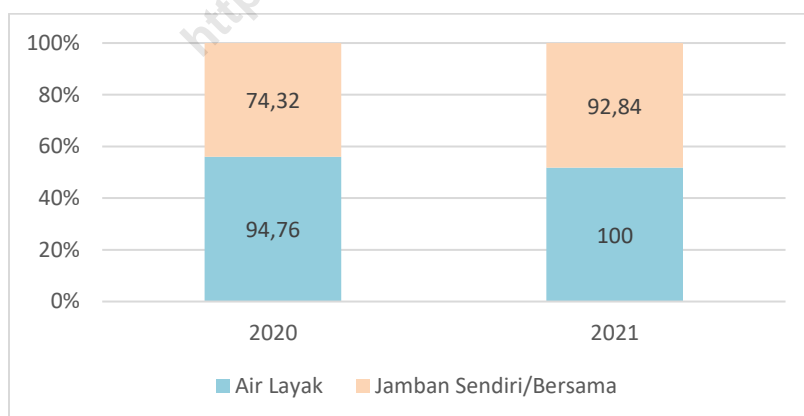
Karakteristik rumah tangga miskin yang tak kalah penting untuk diperhatikan selain pendidikan dan ketenagakerjaan adalah karakteristik perumahan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin kualitas hidup masih rendah jika dilihat dari keleluasaannya dalam beraktivitas di dalam rumah.

Ketersediaan fasilitas air minum dan jamban juga merupakan diantara karakteristik perumahan yang perlu mendapat perhatian. Di Kota Cimahi, persentase rumah tangga miskin yang mengakses air layak mencapai 100 persen pada tahun 2021. Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, *hydrant* umum,

terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bora tau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran, penampungan limbah, dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tanki, air sumur, dan mata air tidak terlindung. Pemerintah terus mengupayakan peningkatan akses rumah tangga terhadap air bersih. Air bersih sebagai sumber air minum merupakan komponen penting dalam mendukung kehidupan yang lebih sehat. Air minum yang tidak terjamin kebersihannya berbahaya bagi kesehatan karena dapat menimbulkan penyakit. Ketika kepala rumah tangga atau ada anggota rumah tangga yang sakit, pengeluaran untuk berobat akan semakin menambah beban rumah tangga tersebut yang pada akhirnya semakin mendorong ke tingkat kemiskinan yang semakin dalam (TNP2K, 2010).

Ketersediaan sanitasi untuk setiap rumah tangga miskin di Kota Cimahi relatif belum memadai. Hal ini ditunjukkan dengan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan fasilitas jamban sendiri / bersama sebesar 92,84 persen pada tahun 2021.

Grafik 7.8 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri / Bersama di Kota Cimahi, Tahun 2020 – 2021



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

SOSIAL LAINNYA



Persentase Penduduk Berusia 5 Tahun ke Atas Menurut Penggunaan Teknologi Informasi Selama 3 Bulan Terakhir

Masih terdapat 8.37% penduduk berusia 5 tahun ke atas yang tidak menggunakan telepon seluler



SOSIAL LAINNYA

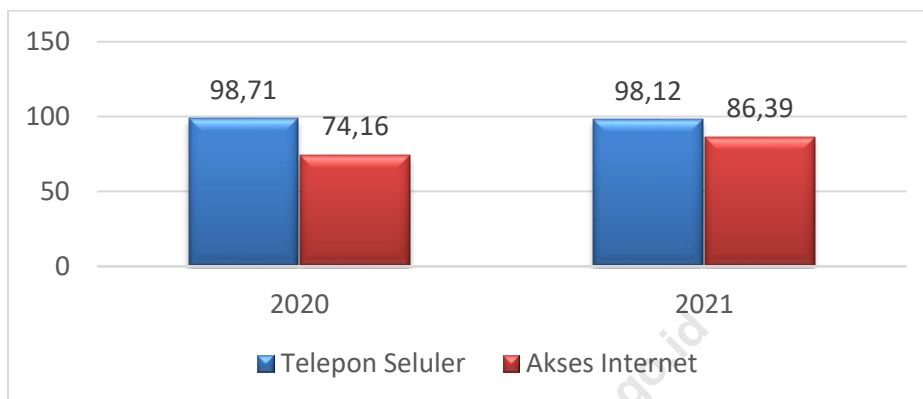
Pada bab ini akan diuraikan beberapa data sosial lainnya yang merupakan pendekatan untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Ciimahi. Cakupan pembahasan meliputi data akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pelayanan Kesehatan. Pengertian akses pada teknologi informasi dan komunikasi juga dapat menjadi indikator yang dapat mengukur kesejahteraan masyarakat. Gaya hidup modern memicu kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang didapat melalui peralatan komunikasi seperti telepon pintar dan komputer. Harga telepon pintar yang semakin terjangkau dan semakin luasnya cakupan wilayah jangkauan frekuensi yang digunakan untuk mengirim dan menerima data internet semakin mempermudah masyarakat dalam mengakses segala informasi.

Kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari akses terhadap pelayanan publik seperti pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan gratis tersebut memungkinkan masyarakat dapat mengalihkan pendapatannya pada keperluan hidup lainnya guna meningkatkan kesejahteraaannya. Selain itu pula rasa aman dan adanya perlindungan dari negara terhadap masyarakat dari gangguan dan ancaman kejahatan diperlukan oleh masyarakat agar dapat beraktivitas.

8.1 Akses pada Teknologi Informasi dan Komunikasi

Peningkatan penggunaan telepon seluler cenderung berdampak kepada kepemilikan rumah tangga atas telepon biasa atau telepon kabel / rumah. Telepon rumah semakin jarang digunakan dan cenderung ditinggalkan. Pada saat ini masyarakat cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana dan lebih bersifat pribadi. Selain itu pula tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain. Pada tahun 2020 persentase penduduk yang memiliki akses internet melalui telepon seluler sebesar 98,12 persen. Nilai ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,59 persen dari semula 98,71 persen

Grafik 8.1 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mempunyai Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Jenis Alat Komunikasi dan Informasi Tahun 2020 dan 2021



Sumber : Kemiskinan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2021

Selanjutnya terkait penduduk yang memiliki akses internet secara keseluruhan di Kota Cimahi mencapai 86,39 persen. Persentase ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan ini akan terus berlangsung seiring dengan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi. Kebutuhan internet masyarakat juga terus meningkat sejalan dengan perkembangan dunia digital. Misalnya, semakin maraknya *online shop*, maupun kegiatan ekonomi lain yang dilakukan secara digital, kebutuhan pada media sosial, serta transportasi *online*. Kebutuhan internet diproyeksikan akan terus meningkat. Salah satunya disebabkan oleh munculnya pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat untuk tetap di rumah. Kegiatan *Work From Home (WFH)*, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), serta kebutuhan hiburan ketika di rumah akan terus mendorong penggunaan internet.

8.2 Perlindungan Sosial

Dalam amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikutnya dalam Pasal 34 UUD 1945 mengatur tentang tanggung jawab pemerintah terkait

masalah kesejahteraan sosial. Pasal 34 UUD 1945 ayat (1) berbunyi Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Pada ayat (2) berbunyi Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bagi fakir miskin dan anak terlantar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut, pemerintah akan memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2021, bantuan sosial yang digulirkan oleh pemerintah diantaranya, yakni Program Keluarga Harapan, Program Indonesia Pintar, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako. Berdasarkan data hasil Susenas Maret 2021, ada sebanyak 8,28 persen rumah tangga di Kota Cimahi yang menerima bantuan pangan non tunai (BPNT) / program sembako. Selanjutnya ada sebanyak 8,24 persen rumah tangga yang salah satu anggota rumah tangganya merupakan penerima Program Indonesia Pintar (PIP). Berikutnya terdapat 7,45 persen rumah tangga di Kota Cimahi yang menjadi penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

LAMPIRAN

<https://civildigital.kota.bps.go.id>

ISTILAH TEKNIS

Air Minum Bersih	Air yang bersumber dari ledeng, air kemasan, serta pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung yang jarak ke tempat pembuangan limbah (septic tank) > 10 meter.
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100.
Angka Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
Angka Kematian Bayi	Probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup)
Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR)	Banyaknya kelahiran per seribu wanita dari golongan umur 15-49 tahun yang terjadi pada waktu tertentu.
Angka Kelahiran Total	Banyaknya anak yang diperkirakan dilahirkan oleh wanita selama masa reproduksi dengan anggapan bahwa perilaku kelahirannya mengikuti pola kelahiran tertentu tanpa memperhitungkan angka kelangsungan hidup wanita.
Angka Kelahiran Kasar	Angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran untuk setiap seribu penduduk yang terjadi di suatu daerah pada waktu tertentu.
Angka Kesakitan	Persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Angka Melek Huruf	Proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya.

Angka Partisipasi Sekolah	Rasio anak yang sekolah pada kelompok umur tertentu terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sama.
Angka Putus Sekolah	Proporsi anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu.
Angka Partisipasi Murni	Proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.
Angkatan Kerja	Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan.
Bekerja	Melakukan kegiatan/pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit satu jam terus-menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi). Mereka yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja dianggap sebagai bekerja.
Indeks Gini	Ukuran pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Nilai Koefisien Gini terletak antara nol yang mencerminkan pemerataan sempurna dan satu yang menggambarkan ketidakmerataan sempurna.
Jumlah Jam Kerja Seluruhnya	Jumlah jam kerja yang digunakan untuk bekerja (tidak termasuk jam kerja istirahat resmi dan jam kerja yang digunakan untuk hal-hal diluar pekerjaan).
Kepadatan Penduduk	Rata-rata banyaknya penduduk per kilometer persegi.
Lapangan Usaha	Bidang kegiatan dari pekerjaan/tempat bekerja dimana seseorang bekerja. Kegiatan in mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam satu digit.

Masih Bersekolah	Sedang mengikuti pendidikan di pendidikan dasar, menengah atau tinggi.
Penganggur	Mereka yang termasuk dalam angkatan kerja dan tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan.
Pengangguran Terbuka	Mereka yang termasuk pengangguran terbuka adalah: a. yang mencari pekerjaan b. yang mempersiapkan usaha c. yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan d. yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Pengeluaran	Pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.
Pekerja Tidak Dibayar	Seseorang yang bekerja membantu usaha untuk memperoleh penghasilan/keuntungan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga atau bukan anggota rumah tangga tanpa mendapat gaji.
Perjalanan	Melakukan perjalanan pergi pulang (PP) sejauh minimal 100 Kilometer dan tidak dalam rangka mencari nafkah dan tidak dilakukan secara rutin.
Perkotaan	Karakteristik sosial ekonomi dari wilayah administratif terkecil. Wilayah ini dikatakan sebagai perkotaan jika memenuhi persyaratan tertentu dalam hal kepadatan penduduk, lapangan kegiatan ekonomi utama, fasilitas-fasilitas perkotaan (jalan raya, sarana pendidikan formal, sarana kesehatan umum, dan sebagainya). Secara operasional penentuan daerah perkotaan dibuat dengan sistim skoring tertentu. Prosedur penentuan daerah perkotaan berlaku sejak tahun 1980 dan masih berlaku hingga saat ini.

Peserta Keluarga Berencana (Akseptor)	Orang yang mempraktekkan salah satu metode kontrasepsi.
Rasio Jenis Kelamin	Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu.
Rata-Rata Lama Sekolah	Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
Status Gizi	Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Kategori status gizi ini dibuat berdasarkan Standar WHO/NCHS.
Status Pekerjaan	Kedudukan seseorang dalam unit usaha/kegiatan dalam melakukan pekerjaan.
Tamat Sekolah	Menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkkan tanda tamat ijazah. Orang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi telah mengikuti ujian dan lulus dianggap tamat sekolah.
Tingkat Partisipasi Angkatan	Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase

SUMBER DATA

Sensus Penduduk (SP)

Sensus Penduduk (SP) Sensus Penduduk (SP) diselenggarakan tiap 10 tahun untuk mengumpulkan data dasar penduduk dan rumah tangga di seluruh wilayah geografis Indonesia. Sejak era kemerdekaan Indonesia telah menyelenggarakan 7 kali sensus penduduk yaitu pada tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, 2010 dan 2020. SP menggunakan dua tahap pencacahan; yaitu, pencacahan lengkap dan pencacahan secara sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing (kecuali anggota Korps Diplomatik beserta keluarganya), awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tuna wisma (gelandangan) yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus/wilayah pencacahan yang terpilih secara acak dan mencakup sekitar 5 persen rumah tangga.

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)

Kegiatan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dimulai pada tahun 1963. Sampai dengan tahun 2010 telah diadakan 40 kali survei. Susenas mengumpulkan data kependudukan, pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan/lingkungan hidup, kegiatan sosial budaya, konsumsi dan pendapatan rumah tangga, dan perjalanan. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang umum dikumpulkan melalui pertanyaan kor (pokok) setiap tahun. Karakteristik sosial ekonomi penduduk yang lebih spesifik, dikumpulkan melalui pertanyaan modul setiap tiga tahun. Pertanyaan-pertanyaan yang dikumpulkan secara berkala dalam pertanyaan modul adalah :

- (a) Konsumsi/Pengeluran
- (b) Kesehatan, Perumahan dan Pemukiman
- (c) Sosial Budaya dan Pendidikan.

Sampai tahun 1991 ukuran sampel Susenas

beragam dari 25 ribu sampai 100 ribu rumah tangga. Pada tahun 1992, sistem pengumpulan data Susenas diperbaharui, yaitu informasi yang digunakan untuk menyusun Inkesra yang terdapat dalam modul (keterangan yang dikumpulkan tiga tahun sekali) ditarik ke dalam kor (kelompok keterangan yang dikumpulkan tiap tahun). Pada tahun 1993 ukuran sampelnya menjadi sekitar 205 ribu rumah tangga. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah sampel rumah tangga juga meningkat. Pada tahun 2010, jumlah sampel rumah tangga mencapai lebih dari 300 ribu rumah tangga tepatnya sekitar 304.368 rumah tangga. Peningkatan jumlah sampel tersebut akan memungkinkan dilakukan penyajian data sampai tingkat kabupaten/kotamadya. Dengan adanya peningkatan jumlah sampel tersebut BPS melibatkan mitra statistik selain mantri statistik dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan. Mulai tahun 2011 Susenas dilaksanakan secara Triwulan yaitu Triwulan I dilaksanakan bulan Maret, Triwulan II dilaksanakan bulan Juni, Triwulan III dilaksanakan bulan September, dan Triwulan IV dilaksanakan bulan Desember. Setiap Triwulan didistribusikan sampel sebanyak 75.000 rumah tangga. Mulai Tahun 2015, pengumpulan data Susenas dilaksanakan dua kali dalam Setahun yaitu pada bulan Maret dan bulan September.

Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS)

Kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pertama kali dilakukan pada tahun 1976 untuk melengkapi data kependudukan khususnya ketenagakerjaan. Sejak tahun 1986-1993, pelaksanaan Sakernas dilakukan 4 kali dalam setahun pada bulan- bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Tetapi mulai 1994-2001 pelaksanaannya dilakukan sekali dalam setahun yaitu sekitar bulan Agustus dengan sampel sekitar 65.000 rumah tangga. Selama periode tahun 2002-2004, Sakernas selain dilakukan secara triwulanan juga dilakukan secara tahunan. Pada tahun 2005 - 2010 Sakernas dilakukan semesteran dilakukan pada bulan Februari dan November, sedangkan pada tahun 2011 - 2014 kembali

dilakukan triwulanan yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Sejak tahun 2015, Sakernas kembali dilaksanakan semesteran yaitu pada bulan Februari dan Agustus.

<https://cimahikota.bps.go.id>

DATA MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA CIMAHI**

Jl. Entjep Kartawiria No. 20 B Citeureup, Kota Cimahi
Telp : (022) 6645985 Email : bps3277@bps.go.id
Website : <https://cimahikota.bps.go.id/>